

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM  
BATIK DI KELURAHAN JETIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah  
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Dosen pembimbing:

**Dr. Aniek Nurhayati, M.Si**

NIP. 196909071994032001

Disusun Oleh:

**Bachtiar Ginegar Alamsyah (I71217050)**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2022**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanurrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Bachtiar Ginegar Alamsyah  
NIM : 171217050  
Program Studi : Ilmu Politik  
Yang Berjudul : **Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan  
Umkm Batik Di Kelurahan Jetis**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun
- 2) Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi ataskarya orang lain
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi

Surabaya, 02 September 2022

Yang menyatakan



Bachtiar Ginegar Alamsyah


NIM.171217050

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah diperiksa dan disetujui skripsi yang di tulis oleh:

Nama : Bachtiar Ginegar Alamsyah  
NIM : 171217050  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program studi : Ilmu Politik  
Judul : Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di  
Kelurahan Jetis

Surabaya, 02 November 2022



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

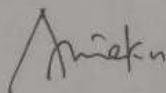
NIP. 196909071994032001

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Bachtiar Ginegar Alamsyah dengan judul "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di Kelurahan Jetis" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 27 Oktober 2022

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Penguji I



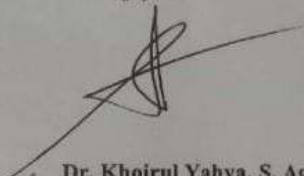
Dr. Aniek Nurhayati, M. Si  
NIP. 196909071994032001

Penguji II



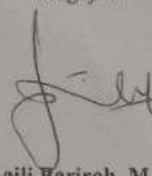
Holilah, S.Ag. M.Si  
NIP. 197610182008012008

Penguji III



Dr. Khoirul Yahya, S. Ag. M. Si  
NIP. 197202062007101003

Penguji IV



Laili Bariroh, M. Si  
NIP. 19771032009122002

Surabaya, 27 Oktober 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Dr. Abd. Chalik, M. Ag

NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: [Perpus@uinsby.ac.id](mailto:Perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bachtiar Ginegar Alamsyah

NIM : I71217050

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Ilmu Politik

E-mail address : [ginegaralamsyah@gmail.com](mailto:ginegaralamsyah@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BATIK DI  
KELURAHAN JETIS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 November 2022

Bachtiar Ginegar Alamsyah

## ABSTRAK

**Bachtiar Ginegar Alamsyah, 2022** *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis* Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci: Tata Kelola, Pemerintahan Kelurahan, Pemberdayaan UMKM Batik**

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi persoalan yang penting dalam mengatur atau mewujudkan bangsa yang mempunyai suatu tatanan perekonomian yang baik serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil, pemerintahan juga berperan penting dalam UMKM agar tidak terjadi penurunan yang sangat signifikan, dengan upaya yang dilakukan pemerintahan seperti dalam pemasaran pemberdayaan sumber daya manusia dan keuangan, untuk menangani hal tersebut mengharuskan untuk membuat kebijakan agar UMKM bisa menjaga masyarakat yang stabilitasnya dalam bidang industri perekonomian, terwujudnya perekonomian yang baik juga berdampak baik dalam perekonomian masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan UMKM batik merupakan hal penting dalam mewujudkan daya perekonomian yang tinggi dengan pengembangan Kota batik di Kampung Jetis Sidoarjo dengan berbagai banyak bangunan rumah pembatik atau pengrajin batik terbesar di Sidoarjo, potensi dengan adanya bangunan-bangunan tempat tinggal pengrajin yang sangat unik dapat memikat wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah kelurahan sangat membantu dalam proses tersebut dimana keterlibatan masyarakat menjadi suatu penguatan dalam mengembangkan usaha batik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk memahami bagaimana tata kelola pemerintahan Kelurahan dalam pemberdayaan UMKM batik di Sidoarjo, dengan mencari jawaban dari penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta tahap-tahap penelitian yaitu mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, mengurus surat izin.

Penelitian ini juga di bedah menggunakan teori pemberdayaan dari Edi Suharto dimana yakni pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan, yaitu untuk menguatkan pemberdayaan yang ada didalam masyarakat, adanya pendekatan pemberdayaan menurut teori pemberdayaan Edi Suharto melalui pendampingan sosial yang membantu penentu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selain itu partisipasi yang ada didalam teori pemberdayaan, pemberdayaan sebagai suatu hasil penentu atau menjadi manfaat dalam sejahteranya masyarakat.

Temuan dari penelitian ini adalah : 1) Pemerintahan Kelurahan dalam mengelola UMKM batik. 2) keterlibatan masyarakat dalam melestarikan usaha batik ditengah pandemi, dengan ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan UMKM batik di kampung batik Jetis Sidoarjo dalam pemberdayaannya berupa pengembangan sumber daya manusia, mengoptimalkan strategi distribusi serta pemenuhan kebutuhan pembatik, pengelolaan UMKM batik oleh pemerintahan melalui upaya pemasaran, dalam hal pemasaran pemerintah kelurahan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam pameran tersebut. Untuk keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan batik dengan penguatan kelembagaan membentuk kelompok masyarakat yang berkeinginan lebih dalam mengembangkan usahanya, bentuk tersebut di lengkapi dengan di penuhi fasilitas yang di butuhkan pembatik seperti pelatihan membatik atau pemasaran.

## ABSTRACT

**Bachtiar Ginegar Alamsyah 2022.** *Village Governance in Empowerment Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) Skipsi*, Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

**Keywords: Governance, Village Government, Empowerment Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) of Batik**

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises is an important issue in regulating or realizing a nation that has a good economic order and creates equitable and fair development. Small and medium enterprises in order to avoid a very significant decline, with the efforts made by the government such as in marketing the empowerment of human and financial resources, to deal with this, it is necessary to make policies so that Small and medium enterprises can maintain a society whose stability is in the industrial sector of the economy, the realization of a good economy also has a good impact on the community's economy, development and empowerment Small and medium enterprises Batik is an important thing in realizing high economic power with the development of the City of Batik in Kampung Jetis Sidoarjo with many buildings of the largest batik houses or batik craftsmen in Sidoarjo, the potential with the existence of buildings where craftsmen live that are very unique can attract tourists who visit the place. the. Community involvement in the empowerment process Small and medium enterprises what the village government does is very helpful in the process where community involvement becomes a reinforcement in developing the batik business.

The research method used in this study is a qualitative research method to understand how village governance in empowering batik small and medium enterprises in Sidoarjo, by looking for answers from writing this thesis using data collection techniques in this study using observation, interviews and documentation techniques. As well as the stages of research, namely preparing a research design, determining the location of the study, taking care of a permit.

This research is also dissected using the theory of empowerment from Edi Suharto where empowerment is a process and a goal, namely to strengthen empowerment in the community, there is an empowerment approach according to Edi Suharto's empowerment theory through social assistance that helps determine the success of community empowerment programs, besides participation which is in the theory of empowerment, empowerment as a determining outcome or a benefit in the welfare of society.

The findings of this study are: 1) Village government in managing batik SMEs. 2) community involvement in preserving batik business in the midst of a pandemic, with the conclusion that empowerment Small and medium enterprises batik in the village of batik Jetis Sidoarjo in its empowerment in the form of developing human resources, optimizing distribution strategies and meeting the needs of batik, managing Small and medium enterprises batik by the government through marketing efforts, in terms of marketing the village government involves the community as actors Small and medium enterprises in the exhibition. For community involvement in batik empowerment with institutional strengthening to form community groups who are more willing to develop their business, this form is equipped with the facilities needed for batik, such as batik training or marketing.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Fokus Penelitian.....	7
F. Definisi Konseptual.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Pengertian, Tujuan, Tugas, Wewenang Pemerintahan Kelurahan.....	17
2. Pemerintahan Kelurahan.....	21
3. Partisipasi Masyarakat.....	22



4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.....	24
C. Kerangka Teori.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	34
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Pemerintahan Kelurahan Dalam Pengelolaan UMKM Batik.....	45
C. Keterlibatan Masyarakat Dalam Melestarikan Usaha Batik di Tengah Pandemi.....	55
D. Analisis Pembahasan.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	
Pedoman Wawancara.....	73
Dokumentasi.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tata kelola pemerintah yang baik.....	29
Tabel 3.1 Nama informan penelitian.....	35
Tabel 3.2 Jadwal wawancara.....	39
Tabel 4.1 Nama pengrajin batik.....	39
Tabel 4.2 Struktur pemerintah Kelurahan.....	42



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tempat lokasi penelitian.....	71
Gambar 5.2 Wawancara dengan informan.....	75
Gambar 5.3 Motif batik Sidoarjo.....	80



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan sendiri merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menjadikan dukungan masyarakat dalam pengembangan potensi di dalam masyarakat dengan berbagai kemampuan, dengan pengembangan pada usaha lokal yang menjadikan suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu memajukan inovasi masyarakat secara mandiri guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi persoalan yang penting dalam mengatur atau mewujudkan bangsa yang mempunyai suatu tatanan perekonomian yang baik serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil berdasarkan RPJMN Tahun 2014 yang berisi kebijakan dalam perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk meningkatkan daya asing UMKM. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pemerintahan dalam pengelolaan pemberdayaan suatu usaha setiap tahunnya dimana persaingan yang semakin ketat, selain itu dalam biaya transaksi yang semakin tinggi setiap tahunnya serta semakin mahalnya sumber daya oleh UMKM.<sup>1</sup>

Pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara maupun daerah dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat, kedua belah pihak baik pemerintah maupun masyarakat dapat memusyawarahkan serta merencanakan suatu program kerja untuk kepentingan masa mendatang. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah perlu melakukan reformasi diberbagai sektor antara lain reformasi di institusi pemerintahan, manajemen publik, serta reformasi birokrasi.

---

<sup>1</sup> Anwar Ramli, Chalid Imran Musa, Muhammad Hasan, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Tinjauan Manajemen, Pustaka Taman Ilmu, 2019, hlm 114

Pemerintahan kelurahan dalam peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan memiliki tugas fungsi dan kewajiban membantu lurah dalam urusan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah Kecamatan Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan Desa, berbeda dengan desa, kelurahan yang memiliki hak mengatur rumah tangganya secara terbatas.

Pemerintahan kelurahan dalam strategi pemberdayaannya merupakan unsur dari kelurahan yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan kelurahan. Ada beberapa bagian dalam pemerintahan kelurahan yang terdiri dari sekretaris dan lainnya, merupakan aparatur atau petugas di bawah naungan lurah baik buruknya pemerintahan.<sup>3</sup> Pada sebuah wilayah daerah yakni Kelurahan memiliki fungsi menjadi sebuah ujung tombak dalam melakukan sebuah pembangunan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tentang pemahaman terkait pengertian kelurahan, bisa digunakan untuk menempatkan kelurahan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berskala kecil, serta merupakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara luas yang dilakukan dengan skala berkelanjutan berdasarkan potensi yang ada. Sebaik baiknya pembangunan, berorientasi pada tujuan pembangunan yakni untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera, serta berkeadilan. Selain memiliki kewenangan sendiri, kelurahan juga memiliki kekuasaan

---

<sup>2</sup> Undang-undang dasar, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang kelurahan

<sup>3</sup> Gunawan, Batera Indra. Mengenal perangkat desa [.http://www.bertaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-des.html](http://www.bertaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-des.html) (Diakses pada senin 14 maret 2021 pukul 00.11)

sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintahan kabupaten. Hal itu merupakan simbol formal kesatuan masyarakat, dan dijelaskan pada pemerintahan Kelurahan yang memiliki wewenang asli Kelurahan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satunya pemerintahan Kelurahan memiliki tugas yang signifikan dalam upaya memberi keterbukaan informasi dalam proses pelayanan sosial terhadap publik. Melalui undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan wacana baru dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peranan masyarakat dalam upaya pembangunan.<sup>4</sup> Sedangkan kelurahan melalui Undang-undang nomor 75 Tahun 2005 kelurahan tidak memiliki wewenang asli desa, kelurahan lebih terbatas dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Keinginan pemerintah beserta perangkat Kelurahan dalam membangun untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang baik, memerlukan aspek-aspek tambahan ataupun dukungan yang tidak lain berasal dari masyarakat sebagai *support system* pembangunan berkelanjutan pada sumber daya manusia. Oleh karena hal itu, dalam kerangka pelaksanaannya membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif. Peluang terhadap wilayah terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis tampak terbuka yang ditandai dengan bukti adanya keselarasan dan keterbukaan terhadap masyarakat untuk dapat memperoleh sebuah informasi dalam hal penelitian ini ada kaitannya dengan informasi pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan maupun pelatihan yang disediakan oleh aparatur kelurahan dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo.

Proses semacam ini merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang terdapat dan

---

<sup>4</sup> Hariadi Pramono, salemba empat (Jakarta :pengelolaan keuangan daerah , 2010),hl 98

digambarkan baik di daerah lokal dengan demikian terciptalah mekanisme yang di sebut dengan *bottom up* yang nyata, bukan merupakan rekayasa musyawarah pembangunan.<sup>5</sup> Pengembangan Kota batik di kampung Jetis Sidoarjo dengan berbagai banyak bangunan rumah pembatik atau pengrajin batik terbesar di Sidoarjo, potensi dengan adanya bangunan-bangunan tempat tinggal pengrajin yang sangat unik dapat memikat wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut.

Bangunan unik tempat tinggal para pengrajin itu seperti jendela besar dan jeruji antik. Daya tertarik sendiri melihat tempat pengrajin yang masih ada sampai saat ini. Identitas atau fisik dari pengrajin batik di Kelurahan Jetis menggunakan bangunan lama merupakan jembatan untuk melestarikan. Sebagai kampung yang memiliki budaya batik, identitas juga selayaknya tidak hanya dimunculkan melalui aspek fisik semata. Tapi dengan aktivitas-aktivitas pengrajin dalam membatik sangat perlu di munculkan untuk suatu identitas dalam situasi masyarakat Kelurahan Jetis. Pentingnya identitas bagi suatu kawasan adalah bagaimana kawasan itu dapat hidup, terus berkembang dan memiliki keunikan tersendiri sebagai fitrah dari bangsa ini.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menafsirkan tata kelola yang dimaksud dalam pembahasan penelitian yang dilakukan, yakni melihat bagaimana rangkaian proses pembuatan kebijakan lembaga yang dapat memperngaruhi pengelolaan serta pengontrolan suatu lembaga dielemen kemasyarakatan melalui pemberdayaan UMKM batik.

Upaya pembangunan kelurahan dalam pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang amat penting terhadap banyak perubahan sosial yang signifikan. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana

---

<sup>5</sup> Labolo Muhadam, "*Dialektika ilmu pemerintahan*" (Sidoarjo : Ghalia Indonesia 2015), hl 115

Pembangunan (Musrenbang) merupakan program Kelurahan untuk membangun Kelurahan secara berkelanjutan, atau kerjasama dari banyak pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau swasta yang secara bersama-sama memiliki tanggung jawab yang sama besar atas keterlibatan pembangunan Kelurahan melalui sarana-sarana permusyawaratan. Pada pembahasannya partisipasi merupakan peran serta seorang atau kelompok dalam proses pembangunan baik itu berbentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dalam hal memberi sumbangsih masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal.<sup>6</sup>

Pengertian ini harus melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Sebab pada dasarnya dalam proses pembangunan tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi Susiantoro, penelitian terfokuskan pada kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada para pelaku UMKM, yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kelurahan Jetis menunjukkan dan menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas tersebut untuk mengupayakan pemberdayaan terhadap masyarakat.<sup>7</sup>

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana pemerintah kelurahan dan keterlibatan masyarakat Jetis Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola UMKM batik dalam pemberdayaannya, dan tidak hanya itu peneliti juga menyajikan objek masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam

---

<sup>6</sup> I Nyoman Sumaryadi, *"Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hl 46.

<sup>7</sup> Jurnal Adi Soesiantoro, *"Pemberdayaan UMKM Batik di Kampoeng Batik Jetis oleh dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo"* (Universitas 17 agustus 1945 Surabaya 2020), hl 5



membuat langkah-langkah apa yang digunakan masyarakat dalam mempertahankan usahanya ditengah pergeseran atau peralihan masa yang menurut peneliti belakangan ini bisa berdampak pada penjualan batik yang kian merosot.

Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo yang terletak didekat pusat kota Sidoarjo yakni sebelah selatan alun-alun Sidoarjo menjadi tempat objek kajian pada penelitian ini, mengenal kehidupan sosial kemasyarakatan serta mengetahui bagian terpenting terjadinya relasi atau hubungan baik antara pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai objek yang tak kalah penting dalam hal penyampaian, musyawarah penentuan kebijakan di kelurahan ini akan tergali lebih lanjut pada penelitian kali ini, dan menariknya adalah ketika Kabupaten Sidoarjo terkenal dengan udangnya, dan industrinya. Peneliti mencari tau bagaimana batik tulis bisa bertahan dan memiliki daya saing dengan industri-industri besar yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan itu kemudian judul dibuat dengan mengusung Judul **“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemerintahan kelurahan mengelola UMKM batik?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melestarikan usaha batik di tengah pandemi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemerintahan kelurahan dalam mengelola UMKM batik.
2. Mengetahui keterlibatan masyarakat desa dalam melestarikan usaha batik di tengah pandemi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teori yaitu penelitian ini dimaksud untuk meninjau bagaimana pemberdayaan pemerintahan yang baik dengan partisipasi masyarakat terlaksana khususnya pada penelitian ini pemberdayaan UMKM yang digeluti oleh masyarakat Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo. Dengan mengungkapkan desain pemerintahan dan prespektif pemberdayaan pada pemerintahan daerah tersebut.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan secara penuh bagi pembaca baik akademisi maupun masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UMKM di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo.  
Harapan dari Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta partisipasi masyarakat khususnya di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo dalam hal Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti, memfokuskan pada aspek bagaimana tata kelola pemerintahan dengan prespektif pemberdayaan untuk melihat rangkaian proses kebijakan lembaga yang dapat mempengaruhi pengelolaan serta pengontrolan suatu masyarakat. Serta melihat kepastian dampak implementasi kebijakan tersebut akan berdampak baik bagi sumber daya masyarakat di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo khususnya pelaku UMKM Batik.

## F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah sebuah penjelasan konsep pada penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan definisi konseptual sebagai acuan yang penting untuk menjelaskan tatakelola perangkat kelurahan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya manusia di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo.

### 1. Tata kelola pemerintahan kelurahan

#### a. Tata kelola

Menurut KBBI arti kata tata yakni aturan, sedangkan kata kelola sendiri memiliki arti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sehingga kita dapat mengartikandengan kedua pendekatan bahasa tersebut yaitu sebagai mengendalikan atau menyelenggarakan sebuah aturan yang dibuat.

#### b. Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan penyelenggaraan di sebuah negara atau bangsa yang kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan mengartikan pemerintahan dalam arti sempit, adalah sebuah kegiatan atau aktifitas yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak eksekutif saja.<sup>8</sup>

#### c. Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil (PNS), kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan

---

<sup>8</sup> Hestu Cipto Handoyo, Hukum tata negara (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2015). hl 118

Desa, berbeda dengan desa, kelurahan yang memiliki hak mengatur rumah tangganya secara terbatas. Pemerintahan kelurahan dalam peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan memiliki tugas fungsi dan kewajiban membantu lurah dalam urusan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu tindakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan kelurahan agar terlaksananya pembangunan manajemen daerah yang efektif melalui musyawarah agar sesuai dengan prosedur tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kelurahan. Adapun menurut ahli Aprilia Thuresia Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam sebuah kegiatan.<sup>10</sup>

Partisipasi masyarakat membantu dalam berlangsungnya pengembangan atau pemberdayaan UMKM batik, justru dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta terlibat dalam pemberdayaan menjadikan suatu usaha tersebut berjalan dengan lancar. Partisipasi masyarakat tidak dipungkiri suatu tindakan dimana suatu individu mempunyai rasa ingin mengetahui, ingin bisa. Segi positif dari partisipasi yaitu tentang penilain kebutuhan dan suatu perencanaan program, dan segi negatifnya menjadikan masyarakat sebagai pelaksana pemberdayaan serta menimbulkan rasa ingin mengetahui permasalahan yang mereka hadapi. Menurut Tjokroamidjojo ada tahapan partisipasi :

- a. Keterlibatan dengan tanggung jawab sebagai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

---

<sup>9</sup> Undang-undang dasar, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang kelurahan

<sup>10</sup> Aprillia Theresia, *“Pembangunan Berbasis Masyarakat”*, (Bandung: Alfabeta, 2014). hl 198

- b. Keterlibatan strategi dalam perencanaan sebagai proses mencari arah yang baik.
- c. Keterlibatan dalam mengambil hasil dan manfaat pemberdayaan.

### 3. Pemberdayaan

Mempunyai berbagai macam pengertian diantaranya pengertian pemberdayaan menurut Edi Papilaya yaitu upaya untuk membangun kemampuan setiap masyarakat dengan cara memotivasi masyarakat, mengajak bangkit akan kesadaran kelebihan yang dimiliki dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki menjadi tindakan yang nyata.<sup>11</sup> Pemberdayaan mempunyai nilai penting bagi pengelolaan sumber daya manusia, dan menjadi sebuah proses kesadaran bagi setiap masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan melalui sebuah peningkatan kelebihan yang menjadi suatu persoalan dan menghadapi kondisi hidup yang diharapkan.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai pemberdayaan dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan menjadikan dorongan untuk masyarakat agar mampu menjadi mandiri dalam permasalahan yang dihadapi dan berjalannya kelangsungan hidup mereka. Pemberdayaan juga menjadikan suatu usaha yang di lakukan mendapatkan hasil yang baik, mengoptimalkan strategi distribusi, dan sumber daya manusia, pemberdayaan menjadi suatu pengembangan bagi usaha UMKM. Terpenuhinya perekonomian masyarakat menjadikan masyarakat selalu mempunyai perkembangan yang baik dalam hidupnya. Faktor tersebut merupakan kelancaran dalam pencarian untuk terpenuhinya kelangsungan hidup setiap individu.

---

<sup>11</sup> Zubaedu “Pembangunan alternatif: Ragam prespektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, (Jakarta: ArRuzz Media, 2007. Hl 42

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini dipetakan menjadi beberapa bab dan sub bab, agar memudahkan penulis, sebagai sistematika pembahasan:

### **Bab I Pendahuluan:**

Peneliti memberi gambaran mengenai latar belakang masalah tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia. Kedua adalah Rumusan Masalah yang didalamnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Ketiga adalah tujuan penelitian, yang didalamnya berisi uraian tentang tujuan penelitian ini dilakukan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Keempat adalah Manfaat penelitian yang didalamnya menjelaskan manfaat dari dilakukannya penelitian ini secara teoritis dan secara praktis. Kelima adalah definisi konseptual, yang didalamnya ada uraian konsep yang disajikan oleh peneliti. Keenam adalah sistematika pembahasan yang didalamnya menguraikan dari bab hingga sub bab untuk mempermudah penelitian ini dikerjakan secara runtut, jelas, dan sistematis.

### **Bab II Kajian Teoritik:**

Pembahasan bab kedua ini peneliti memberi ulasan lebih mengenai tata kelola pemerintahan serta partisipasi masyarakat dilanjutkan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan yang di angkat oleh peneliti, dan menyertakan persamaan dan perbedaan didalam pembahasannya. Selain itu, peneliti juga menjelaskan mengenai kajian pustaka yang dimaksudkan kepada penyaji informasi mengenai gambaran umum tata kelola pemerintahan Kelurahan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Serta memaparkan korelasi dan relevansi antara penelitian dan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan atau

fenomena yang sesuai dengan judul.

### Bab III Metode Penelitian:

Bab ketiga pada penelitian ini memberikan penjelasan terhadap metode yang digunakan peneliti pada saat proses penggalan data dan informasi di lapangan. Didalam bab ini peneliti menjelaskan jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian Kualitatif. Selain itu juga menggambarkan lokasi dan waktu penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Selanjutnya adalah pemilihan subjek penelitian yang berkaitan dengan informan atau narasumber dalam penelitian ini. Tahap tahap penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dan pemeriksaan data.

### Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data:

Bab ke empat, menjelaskan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan fakta yang ditemukan melalui proses penelitian di lapangan. Penjelasan mengenai data yang diperoleh dari penelitian, mulai dari data primer hingga data sekunder semua dipaparkan dalam penelitian ini. Dalam penyajiannya peneliti memaparkan dengan tertulis serta bukti gambar dokumentasi dipaparkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Dan yang terakhir data yang diperoleh dari analisis menggunakan teori yang relevan dengan judul dan penelitian ini.

### Bab V Penutup:

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam proses penelitian ini yang berisi penjelasan dari peneliti dan kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya dan memberikan kesimpulan atas hasil penelitian. Tujuannya untuk mempermudah akademisi atau masyarakat untuk mengetahui tujuan dan kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Penelitian Terdahulu

Bab kedua ini peneliti memberikan prespektif yang berbeda didalam sebuah penelitian yang dilakukan sebelumnya guna menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu:

#### PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENULIS	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	Siti muhimatul	Optimalisasi pengembangan kampung industry batik tulis daerah berdasarkan <i>Mapping Value Chain</i> , Jurnal 2017	Penelitian ini membahas dalam upaya pengembangan industri batik dengan melalui berbagai strategi di rintis dari dekranasda menjadikan kampung batik berubah menjadi sentra, adanya kampung batik di kota Semarang bertujuan untuk melatih lebih kreatif suatu pengrajin di kota tersebut, pelaksanaannya pun sesuai dengan apa yang di inginkan para pengrajin.
2.	Fahmi Ashari	Efektivitas tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi dana Desa di Desa wringinjajar, skripsi 2019.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana tata kelola yang baik agar ekonomi desa tersebut semakin membaik, dalam pengelolaan di desa wringinjajar tidakegitu baik karna dalam masyarakatnya sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam usaha yang ada di desa wringinjajar, pemerintahan yang tertutup sehingga untuk mencari ide dan mencari strategi dalam efektivitas tata kelola pemerintahan implementasi desa tidak



			begitu baik.
3.	Anna wardana	Good tourism governance dalam pengelolaan beautiful malino di kabupaten Gowa, Skripsi 2020	Penelitian ini menelaah mengenai penerapan good governace adanya turis di Kabupaten Gowa, pengelolaan yang baik menurut pemerintahan desa dengan berbagai strategi yang di gunakan good governance sendiri menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata untuk turis yang harus di terapkan dengan melibatkan orang-orang yang faham akan pariwisata untuk turis di daerah kecamatan Gowa.
4.	Nikmah	Tata kelola pemerintahan desa wisata (village governance) (Studi kasus tata kelola pemerintahan desa Pujon Kidul kabupaten Malang), Skripsi 2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan adanya wisata di pujonkidul malang, karna desa pujon kidul merupakan desnitasi wisata yang baik di daerah malang pengambilan keputusan untuk wisata tersebut penting di lakukan karna untuk baiknya wisata pujonkidul dampak adanya pengambilan keputusan yang baik dan sesuai peraturan pemerintahan.
5.	Muhammad agus junaidi	Pemberdayaan UMKM batik tulis di kampoeng batik jetis oleh dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten Sidoarjo, Skripsi 2020	Penelitian ini membahas mengenai pemeberdayaan kampung batik yang mempunyai permasalahan pada penerus yang akan meneruskan kampung batik di Sidoarjo, pemasaran yang menghambat proses produksi batik baru. Peneliti di atas memilih pemberdayaan umkm karena mengaharap adanya pemberdayaan UMKM tersebut menjadikan kampung

			batik Sidoarjo berkembang dan tidak ada kesulitan dalam produksi.
6.	Natalia gratia sanding, Dkk	Penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal 2018	Hasil penelitian menunjukkan bagaimana penerapan tata kelola pemerintahan di kantor kecamatan Modoinding yang mana tata kelola tersebut yang sudah terlaksana atau yang belum sehingga dengan belumnya penerapan yang belum terlaksana menggunakan masyarakat ikut andil dalam partisipasi kegiatan pemerintah desa kelibatan masyarakat dalam kegiatan mendapatkan nilai positif.
7.	Desi pramadani	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada masa new normal di desa Cakura kabupaten Takalar, Skripsi 2021	Penelitian tersebut menjelaskan adanya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, mekanisme pemerintah desa Cakura dalam pemberdayaan di masa pandemi melalui beberapa penataan dalam pemberdayaan masyarakat, sama dalam metode penelitian kualitatif yang mana mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat.
8.	Doni Hiwatawa	Tata kelola pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata (Di desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, Skripsi 2020	Penelitian ini meneliti mengenai pemberdayaan di bidang pariwisata dimana pariwisata merupakan suatu aspek dalam pengembangan ekonomi di Negara-negara manapun, perkembangan ekonomi semakin pesat juga di karenakan ada destinasi wisata yang banyak sekali ingin di kunjungi orang-orang bagaimana tata kelola yang baik untuk pemberdayaan masyarakat di bidang

			pariwisata.
9.	Suryadi	Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Teluk Nilap kecamatan Kubu Babussalam kabupaten Rokan Hilir, Skripsi 2020	Penelitian tersebut membahas pemberdayaan masyarakat di desa Teluk Nilap karna kondisi geografis desa Teluk bagus dan memedai, kondisi yang harus menekankan pemberdayaan dengan mempelajari hambatan apa saja yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat,
10.	Hendi sandi	Tata kelola pemerintahandesa dalam mewujudkan good governance di desa Kalibelo kabupaten Kediri, Jurnal 2017	Penelitian tersebut membahas mengenai faktor apa saja yang mendorong pemerintahan desa dalam good governance desa Kalibelo seperti membuat sistematika kerja atau di sebut tata kelola seperti aturan- aturan kerja dan hambatan yang di hadapi setelah adanya faktor yang di tentukan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian yang relevan sudah dilakukan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yakni untuk penelitian terdahulu kebanyakan hanya fokus dengan bagaimana adanya pemberdayaan, penerapan yang sesuai dengan pemerintahan kelurahan, penerapan tata kelola pemerintahan yang sudah terlaksana atau belum terlaksana, sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti yakni membahas bagaimana pemberdayaan yang baik yang dilakukan pemerintahan untuk UMKM batik serta bagaimana keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam melestarikan, mengelola UMKM batik Jetis Sidoarjo. Karna dengan adanya prinsip pemberdayaan yang sangat tertata untuk masa mendatang akan menghasilkan suatu pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan tata kelola pemerintah Kelurahan Jetis, baiknya

masyarakat yang ikut terlibat dalam pelestarian batik juga mengakibatkan jalannya usaha batik yang sesuai dengan target pemberdayaan yang baik.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian, Tujuan, Tugas, Wewenang Pemerintahan daerah**

#### a) Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pengertian didalamnya yakni: Penyelenggara Pemerintahan di tingkat daerah dan perwakilan rakyat daerah yang disingkat (DPRD) dapat menggunakan sebuah asas otonomi daerah serta tugas bantuan yang menggunakan prinsip otonomi daerah. Selain itu juga sefaham dengan aturan maupun prinsip yang tertuang di dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Prinsip prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam cara yakni: Pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing sebuah daerahitu sendiri dengan mengkorelasikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta ciri khas suatu daerah, dan itu merupakan susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (7) tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>12</sup>

Di Indonesia dalam pembagian wilayahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Membagi bagian wilayah atas daerah dan provinsi, kemudian disetiap provinsi terbagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan wilayah Kota, sampai pada

---

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, " *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* " (Malang : SinarGrafika, 2017), hal 1

pembagian wilayah di setiap kabupaten atau kota terdapat pembagian wilayah kelurahan

Dalam wilayah kabupaten dan Kota memiliki tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintahan provinsi, pemerintahan Kota, pemerintahan kabupaten mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintahan daerah menjalankan Otonomi daerah yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang di atur oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat.<sup>13</sup>

Adapun Eksistensi pemerintahan daerah yang di kemukakan oleh Harson:

#### 1. *Local Self Governmennt*

Pemerintahan lokal daerah harus memiliki sistem yang berbeda dengan pemerintahan pusat dalam kerangka sistem, mekipun pada dasarnya pemerintahan pusat merupakan acuan bagu pemerintahan lokal. Pemerintahan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri memiliki hak serta wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerahnya atas kebijaksanaanyasendiri.

#### 2. *Local State Government*

Penyelenggaraan pemerintahan di dalam sebuah negara dibentuk tidak hanya dikelola oleh pemerintahan pusat, namun aturan urusan administratif negara juga menyerahkan tugasnya terhadap pemerintahan daerah yang diberi wewenang dan hak dan diatur dalam Undang-Undang Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini merupakan eksistensi dan kewajaran dari sebuah negara dalam tata kelola pemerintahan yang mana disebabkan sangat luasnya jangkauan ke dalam setiap daerah serta mengingat pembagian wilayahnya di dalam sebuah negara dalam urusan pemerintahan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 5

Pejabat yang mengurus administratif tersebut diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan pusat, bekerja berdasarkan aturan dan kehendak yang diinginkan oleh pusat, berdasarkan herarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah untuk mengurus dan mengerjakan administratif di Wilayah Daerah.<sup>14</sup>

b) Tujuan Pemerintahan Daerah

Adapun tujuan dari pemerintahan daerah yang kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di dalamnya menerangkan bahwa pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta peningkatan daya saing daerah.<sup>15</sup>

c) Tugas Pemerintahan Daerah

Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas pemerintahan daerah terbagi menjadi tiga (3), Yaitu: Pemerintahan Absolut, Pemerintahan Konkuren, dan Pemerintahan Umum. Urusan yang masuk dalam fungsi pemerintahan memiliki kewenangan pada pemerintahan pusat. Namun tetap saja pemerintahan pusat dapat memberikan kewenangan ini kepada pemerintahan daerah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa: “Contoh dari Pemerintahan Absolut adalah: Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter, dan Fiskal Nasional, serta Agama.”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan daerah mengatakan bahwa: “Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Sinyo Harry Sarundajang, “*Arus Balik Kekusaan Pusat ke Daerah*”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). Hal 77

<sup>15</sup> Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, “*Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*”, (Makasar: PT. RajaGrafindo Prasada, 2017). Hal 23

pelayanan dasar adalah: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan keluarga berencana, hubungan, komunikasi, dan informatika Koperasi, Usaha Kecil, dan menengah, penanaman modal kependudukan dan olahraga, statistik. Persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menyebutkan:”Contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.<sup>16</sup>

d) Kewenangan Pemerintahan daerah

Kewenangan Daerah Kabupaten/kota terkait dengan otonomi daerah sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan: “Urusan Pemerintahan yang Urusannya didalam lokasi Kabupaten atau Kota. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan yang dapat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/kota.”

---

<sup>16</sup> Ani Sri Rahayu, “*Pengantar Pemerintahan daerah Kajian Teori , Hukum dan Aplikasinya*”, (Malang : SinarGrafika 2017) Hal 9

Pada hakikatnya pemerintahan pusat dapat mempengaruhi pemerintahan daerah dengan wewenangnya, namun tetap saja apabila pemerintahan pusat belum mengatur segala hal yang berkaitan dengan daerah, maka pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dilingkup daerah berdasarkan perundang-undangan. Hal itu seperti yang sudah tercantumkan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantu.”

Dengan hal itu berarti sistem hukum di Indonesia memberikan kewenangan kepada wilayah di daerah untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya. Dalam pembuatannya pun pemerintan daerah wajib mengharmonisasikan antara perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan pusat dan daerah.<sup>17</sup>

## 2. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan diartikan sebagai kumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga tempat mereka bekerja. Menurut syafi'i secara etimologi mengartikan pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk urusan yang diurus oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan kelurahan adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha dari masyarakat kelurahan yang bersangkutan dengan upaya pemerintahan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kewenangan Pemerintahan Darerah dalam pembuatan Peraturan Daerah <http://ditjenpp.kemenkuham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-> Di akses pada 24 Maret 2022 Pukul 01:55

<sup>18</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, “*Sosiologi Pedesaan*”, (Surakarta: Pustaka Setia, 2019). Hal 109



Kelurahan yaitu sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan. Kelurahan juga mempunyai tugas pokok dan fungsi, seperti menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, pengembangan fasilitas perekonomian masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat, sementara perangkat lainnya masih merupakan kelompok yang terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. Sedangkan jumlah yang ada di dalam kesatuan pemerintahan kelurahan merupakan tergantung dari kebutuhan, kondisi sosial masyarakat, dan kemampuan keuangan.<sup>19</sup>

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau lebih dalam hal menyumbangkan bentuk tenaga maupun pikiran untuk dapat memperoleh tujuan bersama. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat pembahasan mengenai partisipasi merupakan nilai dasar yang kaitannya dimiliki oleh elemen masyarakat sendiri. Menurut Irine, Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mengharuskan mereka menuju tujuan bersama dan itu merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting dalam semua proses awal hingga akhir, oleh menurut Koho<sup>20</sup> Menjelaskan pemahaman terkait dengan partisipasi masyarakat yang dapat terjadi pada empat (4) jenjang dalam kehidupan bermasyarakat yakni:

---

<sup>19</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Prespektif UU No.6/2014*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016). Hal 193

<sup>20</sup> Koho, JosefRiwu, *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).Hal 126

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dilakukan pemerintah Kelurahan menunjukkan adanya dukungan dari masyarakat maupun pemerintahan Kelurahan, adapun hal tersebut memberikan umpan baik dalam menjalani kegiatan untuk mencapai tujuan yang baik. Seperti pemerintahan Kelurahan berpartisipasi secara langsung dalam pemberdayaan UMKM batik, juga masyarakat berpartisipasi akan kegiatan tersebut. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan mempunyai bentuk yang berbeda-beda.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM batik dilakukan masyarakat tidak dengan paksaan tetapi dengan kemauan masyarakat pembatik, dengan tidak ada paksaan memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pemberdayaan UMKM batik. Partisipasi masyarakat terbilang sudah baik dan meskipun dalam hal tersebut baik tetapi masyarakat harus peka terhadap kondisi sosial lingkungannya. Melakukan pengawasan serta evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UMKM batik. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM batik mempunyai kesadaran masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi alur dari kegiatan pemberdayaan UMKM batik.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Pemanfaatan hasil dari pemberdayaan UMKM batik merupakan hasil yang dilakukan masyarakat dan pemerintahan Kelurahan dalam memperbaiki perekonomian masyarakat, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat sedikit demi sedikit terpenuhi karena baiknya perekonomian masyarakat.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Selain itu juga dijelaskan oleh Isbandi terkait partisipasi masyarakat menurutnya adalah: Keikutsertaan Masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah yang ada di sebuah kelompok masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang

alternatif untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah. Sulaiman juga menggambarkan bahwa partisipasi sosial merupakan sebuah keterlibatan aktif dari warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan dimana masyarakatnya ikut serta dalam usaha pelayanan yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.<sup>21</sup>

Dari beberapa ahli di atas maka, dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pemerintahan jika dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Keberadaan serta keterlibatan masyarakat merupakan kunci berjalannya demokrasi di negara kesatuan republik Indonesia. Dalam aktivitasnya tentu elemen masyarakat memiliki dampak positif dalam membantu kerja pemerintahan. Dampak positif membantu perkembangan perekonomian masyarakat yang semulanya tidak stabil, namun dengan banyaknya strategi yang dilakukan menghasilkan perbaikan dalam segi perekonomian.

#### **4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia**

Pemberdayaan Menurut Sudarmayanti Secara umum diartikan sebagai lebihberdaya dari kondisi sebelumnya, baik dalam perihal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan yang dimilikinya. Kemudian dalam hal lain masih terkait dengan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sumber daya yang berasal dari kehidupan manusia yang memiliki kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.

Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran terhadap masyarakat secara partisipatif

---

<sup>21</sup> Isbandi rukminto, "Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007). Hal 27.

dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam adanya persoalan yang terjadi dengan mewujudkan suatu kondisi hidup yang baik sesuai dengan keinginan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud disini merupakan subjek yang sangat penting dalam menjalankan dan mengembangkan setiap usaha serta menentukan kestabilan pemerataan ekonomi yang dimiliki oleh pelaku usaha batik. Sumber daya manusia tidak hanya dimiliki pemilik usaha melainkan para tenaga kerja pegawainya juga harus memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Peningkatan teknologi juga membantu dalam pemberdayaan sumber daya manusia, salah satunya dalam hal promosi dan pemasaran. Teknologi sebagai alat dimana masyarakat memasarkan hasil batik yang mereka kerjakan, banyaknya masyarakat yang bisa mengelola teknologi sebaik mungkin menjadikan mudahnya kegiatan pemasaran dalam usaha batik. Selain teknologi juga dalam permodalan yang ada pada unit usaha tersebut, permodalan menjadi salah satu penghambat suatu usaha. Dimana dalam bidang permodalan apabila berjalan dengan baik maka memudahkan suatu usaha tersebut dalam mengembangkan usahanya, seperti halnya dalam penyokongan terhadap UMKM sangat dibutuhkan. Hal ini karena pemerintah terlibat untuk memberikan motivasi, memberikan arahan terhadap pelaku UMKM, Sumber daya manusia merupakan salah satu keterbatasan kemampuan dalam aspek kewirausahaan. Rendah kemampuan masyarakat untuk berwirausaha membuat pelaku UMKM Batik Malangan menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Batik.

### **C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir atau kerangka teori yakni menerangkan bagaimana kaitannya penelitian ini dilakukan dengan variabel-variabel yang telah ditentukan, sedangkan kerangka berfikir sendiri adalah sebuah teori yang mencoba menghubungkan berbagai macam faktor yang

ditentukan atau ditetapkan menjadi penting dalam pembahasan penelitian. Dalam kerangka teori peneliti mendiskripsikan permasalahan dari penelitiannya dengan terurai secara jelas.

Maka dari itu peneliti menggunakan konsep atau teori Pemberdayaan menurut Edi Suharto yakni pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Yaitu merupakan serangkaian untuk menguatkan pemberdayaan yang ada didalam masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami perekonomian menurun melalui cara seperti memotivasi masyarakat, membangkitkan kesadaran akan potensi pemberdayaan dalam usaha-usaha yang dikerjakan masyarakat.<sup>22</sup>

Mengembangkan potensi tersebut menjadi suatu tindakan yang nyata. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan yakni pemberdayaan menentukan keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, masyarakat yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengetahuan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pemberdayaan tidak dibolehkan adanya ketergantungan, namun harus bisa mendorong kreativitas, kemandirian masyarakat dalam melakukan pembangkitan perekonomian.

Filosofi pemberdayaan dapat digali dengan menggunakan konsep-konsep filosofi penyuluhan. Banyak kepustakaan tentang falsafah penyuluhan diantaranya falsafah yang sedang berkembang yaitu falsafah 3-T yaitu teach, truth, and trust (pendidikan, kebenaran, dan kepercayaan/keyakinan). Dalam arti pemberdayaan menjadi suatu pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang diyakini. Pemberdayaan harus berpijak pada kepentingan perkembangan individu. Menurut Mardikanto pemberdayaan mempunyai prinsip-prinsip

---

Wafiq azizah "Upaya Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sentra Batik Di Kabupaten Muaro Jambi Di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19" Skripsi studi Ilmu Pemerintahan Fakultas syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2022, hal 45

yaitu :

- a. Mengerjakan, yakni kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kelurahan harus ada keterlibatan dari masyarakat dalam mengerjakan sesuatu, karna masyarakat melakukan suatu melalui pekerjaan akan mengalami proses belajar ( belajar berfikir, menggunakan perasaan).
- b. Akibat, yakni kegiatan pemberdayaan harus ada akibat yang baik dan bermanfaat. Karena setiap individu apabila mempunyai rasa kesenangan dalam hati setiap individu mempengaruhi tingginya semangat dalam mengikuti proses pemberdayaan dimasa sekarang atau yang akan datang.
- c. Asosiasi, yakni dalam kegiatan pemberdayaan baiknya dikaitkan dengan kegiatan lainnya, dikarenakan setiap individu biasanya sering mengaitkan kegiatan atau peristiwa lainnya.

Suatu individu biasanya selalu mengaitkan suatu produktifitas dengan proses produksi, pada hakikatnya produktifitas mempunyai sikap yang biasanya berfikir dalam suatu pekerjaan harus lebih baik dari hari kemarin. produktivitas itu sebagai perpaduan antara efektivitas dan efisiensi. Karena itu produktivitas dapat di artikan sebagai ukuran sampai sejauh mana sumber daya disertakan dan dipadukan dalam organisasi dan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perekonomian berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, ekonomi keluarga dapat diukur dari pemenuhan materi dalam keluarga. Secara umum kesejahteraan menjadi suatu kegiatan yang memenuhi secara finansial oleh keluarga. Konsep kesejahteraan juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa pemenuhan dasar terjadi karna adanya beberapa indikator yakni : kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, kesehatan juga bidang

pendidikan. Selanjutnya kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan jiwa sosial yang mewujudkan kesenangan dalam kehidupan, juga kebutuhan pengembangan yang mewujudkan pengetahuan yang berfungsi dalam pengembangan diri suatu individu.

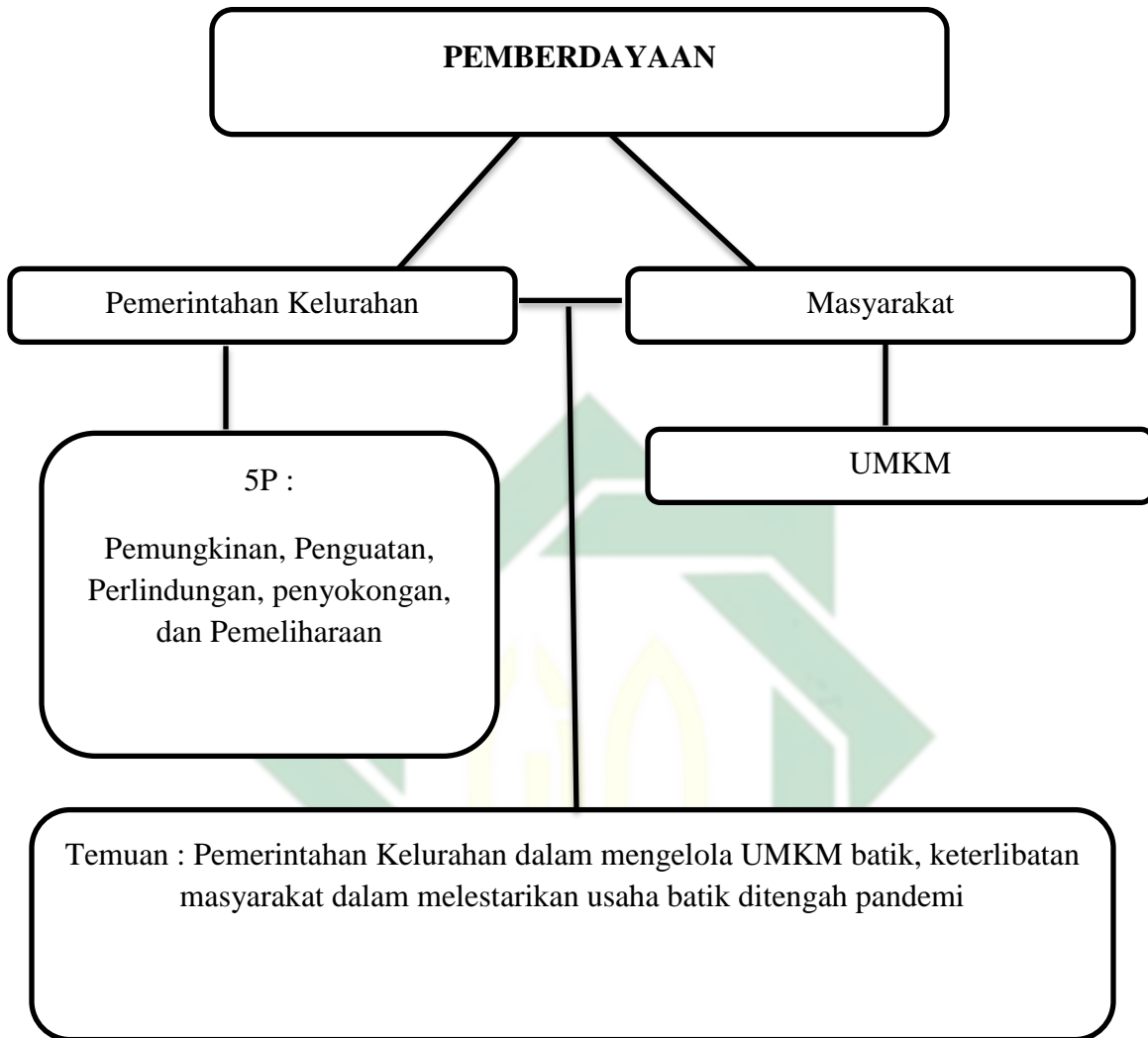
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Kemudian kerangka berfikir dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut:



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Dalam penelitian ini digambarkan pada kerangka berfikir melalui strukturnya maka melihat juga selain dari pada pembuat kebijakan di lingkup kelurahan, apakah keinginan masyarakat dalam hal ini ikut terlibat dalam partisipasi masyarakat. Maka haruslah disertai dengan adanya keterlibatan masyarakat serta kerjasama dengan pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintahan kelurahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkantata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.



Kemudian dalam pendekatan pemberdayaan menurut Edi Suharto melalui pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang membantu penentu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi publik dalam pemberdayaan sangat dipentingkan, pendampingan sosial pada lima bidang tugas juga fungsi serta pelaksanaan proses pencapaian yang ada didalam pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P :

- 1) Pemungkinan : mewujudkan suasana atau keadaan yang baik untuk memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus bisa melepaskan masyarakat dari suatu sekat-sekat kultural maupun struktural yang menghambat suatu pemberdayaan.
- 2) Penguatan : menguatkan kemampuan serta pengetahuan masyarakat dalam suatu permasalahan agar masyarakat mampu memecahkan permasalahan, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya tidak kurang namun cukup. Pemberdayaan seharusnya harus bisa menumbuhkan suatu kepercayaan diri masyarakat yang menghasilkan kemandirian masyarakat.
- 3) Perlindungan : adanya perlindungan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang lemah akan kemampuan atau kreativitas, agar tidak tertindas oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih. Tujuannya agar menjaga persaingan yang tidak sepadan antara yang mampu dan tidak mampu, mencegah eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok yang tidak kuat.
- 4) Penyokongan : pembimbingan dan dukungan terhadap masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan dengan baik tugas-tugas dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus bisa menyokong masyarakat agar tidak menjadikan masyarakat terjatuh miskin.

- 5) Pemeliharaan : mampu memelihara keadaan yang baik dan keadaan yang tidak baik, yang kondusif agar terjadinya keseimbangan antara kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus menjalin kesederhanaan dan keseimbangan yang baik agar menumbuhkan kesempatan bagi setiap masyarakat.

Pemberdayaan UMKM sendiri salah satu usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah juga mengupayakan pengembangan UMKM dengan salah satunya memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat pengrajin batik, hal tersebut tidak lepas dari bantuan pemerintahan. Pemberdayaan UMKM dilakukan sebagai pembangunan perekonomian nasional yang dilakukan berdasarkan asas demokrasi perekonomian yang meningkat, dan prinsip dari pemberdayaan UMKM menumbuhkan rasa kebersamaan, mandiri, dan peningkatan daya asing oleh UMKM.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan sesuatu dengan landasan utama untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan lebih baik keinginan bangsa. Masyarakat juga ditata dan berkaitan dengan sumber nilai sosial, politik dan budaya, dimana pemberdayaan menjadi suatu proses perubahan sosial yang memiliki proses untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dalam kualitas hidup, adapun berbagai upaya yang dilakukan seperti : memotivasi peningkatan kemampuan masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang dimaksud penelitian ini adalah hasil dari pada diskusi maupun musyawarah atau kesepakatan antara elemen masyarakat dan pemerintahan kelurahan sebagai pembuat kebijakan akan berdampak pada pemberdayaan melalui sumber daya manusia. Melihat seperti apa pengelolaan sumber dayadi

Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo mestinya peneliti mengarah pada Pengelolaan UMKM oleh masyarakat setempat yang ada kaitannya dengan hal di atas yakni tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan atau peraturan yang dibuat berdasarkan asas kenegaraan serta pasrtisipasi masyarakatnya, dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo. Sumber daya manusia merupakan salah satu penunjang baiknya faktor ekonomi dan bagaimana sumber daya manusia tersebut mempunyai daya saing yang tinggi dalam banyaknya persaingan industri lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika akan menjawab atau menentukan rumusan masalah dalam sebuah penelitian, maka akan dapat lebih mudah menentukan. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan penelitian yang di lakukan. Dalam penelitian sosial, sebuah pendekatan mencakup tiga (3) Jenis Pendekatan yaitu: Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, dan pendekatan campuran.

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian Kualitatif, pendekatan kualitatif dilakukan untuk membantu mengutarakan kelebihan dalam mendeskripsikan informasi dalam bentuk perilaku objek seperti dalam tindakan dan pengalaman terhadap masalah pembahasan penelitian. Pada pendekatan kualitatif adanya dasar kelengkapan awal dari pembahasan yang dicari sebagai pelengkap dan manusia menjadi instrumen penelitian, Menggunakan observasi menjadi kegiatan pengumpulan data yang dicari peneliti, dan wawancara secara detail permasalahan yang dicari, selalu ada proses dalam setiap hasil.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kampoeng Batik Kelurahan Jetis Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo tepatnya di jalan P. Diponegoro, Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213. Dalam pengerjaannya penelitian ini dilakukan secara bertahap guna efisiensi waktu, selain melakukan wawancara secara langsung peneliti

dibantu oleh warga dan pemerintahan maupun perangkat kelurahan setempat di berikan bantuan wawancara melalui online menggunakan media (whatsApp) dalam mempermudah pengumpulan data penelitian. Dengan jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin sampai data benar-benar sudah lengkap sesuai yang dicari.

### **C. Pemilihan Subyek Penelitian**

Subyek penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder dimana kedua sumber tersebut bermanfaat dalam suatu penelitian, peneliti memilih sumber data agar lebih mudah dalam penjelasan sebagai fakta mengenai suatu fenomena yang terdiri dari situasi baik buruk, berhasil atau tidak berhasil dan dapat dijadikan informasi pada penelitian yang dilakukan serta bisa dideskripsikan pada bab hasil dan pembahasan penelitian. Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari asal mula data didapatkan.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi kata atau lisan dari kegiatan wawancara, interview dilakukan dari perilaku objek peneliti yang diamati. Data-data itu berasal dari adanya wawancara, interview dan observasi kepada masyarakat pelaku UMKM dan pemerintahan kelurahan kampoeng batik Kelurahan Jetis Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data dalam subyek penelitian yaitu:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer pada penelitian diambil dari sumber data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada pemerintahan kelurahan, pada pembahasan ini yakni Bapak Slamet Riyadi, SH sebagai Sekertaris Kelurahan. Sumber informasi yang

---

<sup>23</sup> Suharsimi arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*”, (Jakarta : Rineka cipta, 2006), Hal 129

mempunyai kekuasaan dalam pengumpulan data yakni disebut informan pertama yang didapatkan langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap masyarakat pelaku UMKM dan pemerintahan Kelurahan kampoeng batik Jetis Sidoarjo yang di anggap mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kelurahan Jetis dalam sumber data initerdiri dari nama, identitas, catatan peneliti saat di lapangan, juga penjelasan wawancara dengan informan pertama, tak lupa rekaman hasil wawancara.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber yang berasal dari buku atau dokumen-dokumen yang ada, sumber ini memiliki manfaat sebagai pendukung sumber utama yang menunjang keaslian data yang diberikan informan utama, data sekunder didapatkan dalam observasi pada penelitian.

Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	STATUS
1.	Slamet Riyadi, SH	Sekretaris Kleurahan
2.	Akhmad Hariyadi, SH	Kepala Kelurahan
3.	Yueni	Pengadministrasian Umum
4.	Agus Setiawan, S.Sos	Kepala urusan pembangunan/pemberdayaan
5.	Samsul ma'arif	Kepala Pelayanan
6.	Amir Mulyono	Pemilik usaha Batik
7.	Miati	Pengrajin
8.	Supiadi	Pengrajin
9.	Muntahar	Pengrajin

#### **D. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ada beberapa tahapan penelitian sebelum proses penyusunan laporan penelitian yang akan dilakukan, demikian tahapan yang dilakukan sebelum dilapangan yakni:

- a. Peneliti menyiapkan penelitian dan mempersiapkan rancangan untuk dijadikan proposal penelitian.
- b. Menentukan lokasi penelitian yang akan dilakukan sebelum proposal dikerjakan.
- c. Peneliti mengurus izin penelitian untuk proposal yang akan diajukan.
- d. Perizinan sudah selesai, begitupun peneliti langsung mengajukan permohonan kepada pemerintah Kelurahan Jetis Kampung Batik Sidoarjo.
- e. Penelitian dilaksanakan sesudah hasil perizinan diterima dan disetujui oleh Pemerintah Kelurahan Jetis Kampung Batik Sidoarjo.

Tahapan yang dilakukan di lapangan:

- Pertama, peneliti datang langsung ke tempat penelitian di Kampung Batik Jetis Sidoarjo.
- Kedua, peneliti melakukan wawancara agar mendapatkan data yang relevan sesuai pembahasan yang diambil peneliti dalam proses penelitian. Data dari pemerintahan Kelurahan Jetis kampung batik Sidoarjo.
- Ketiga, melakukan penyatuan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan.
- Terakhir, peneliti melakukan penyusunan laporan data yang didapatkan serta

melakukan analisis diperolehnya data yang dicari karena menjadi sebuah hasil dan pembahasan penelitian yang diteliti.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti agar memperoleh dokumen yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti memakai beberapa metode dalam teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menunjukkan cara menghasilkan suatu data melalui kegiatan langsung terjun di lapangan di tempat penelitian tersebut untuk melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, seperti yang dilakukan saat observasi berlangsung yakni, merekam kegiatan yang ada di lokasi, mengambil foto, mencatat data-data yang diperlukan saat penelitian.

Hal tersebut dilakukan agar mempermudah mendapatkan informasi yang sesuai dibutuhkan peneliti saat melakukan penelitian. Observasi yang digunakan penelitian yakni observasi partisipasi atau di sebut (*Participant observation*), peneliti terlibat adanya kegiatan yang dilakukan seseorang yang diamati peneliti atau disebut sumber data penelitian.<sup>24</sup>

Observasi partisipasi, di mana peneliti mengerti bagaimana kegiatan sehari-hari di lokasi penelitian, mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah kelurahan dengan mengetahui bagaimana kegiatan sehari-hari di lokasi secara langsung setiap kegiatan di lokasi diikuti saat observasi berlangsung. Manfaat observasi partisipasi ini mempermudah

---

<sup>24</sup> Dr. Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D" (Bandung, Afabeta cv 2017) hl 227



peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dan mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kampung Batik tersebut.

## 2. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yakni wawancara sebagai proses pengumpulan data dengan cara komunikasi atau bisa di sebut (*Interview*) di mana peneliti melakukan proses wawancara di tempat lokasi secara langsung *face to face* pewawancara harus mengetahui situasi dan kondisi untuk memilih waktu pelaksanaan wawancara untuk melengkapi informasi yang dicari peneliti. Maka dari itu penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terstruktur. Wawancara berstruktur yakni proses wawancara dimana semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, dan biasanya dilakukan secara tertulis.<sup>25</sup>

Dalam kegiatan wawancara peneliti bisa menggunakan pedoman wawancara untuk digunakan dalam melakukan wawancara, pedoman tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis peneliti untuk bahan wawancara.

Proses penggalian data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan langkah-langkah seperti: Pertama, membuat daftar atau tabel wawancara sesuai dengan tema yang digunakan dalam penelitian. Kedua, memfokuskan pertanyaan dengan objek penelitian yakni pemerintahan kelurahan dan masyarakat pelaku UMKM. Ketiga, melakukan kontak dengan Narasumber yang berkelanjutan menghasilkan proses wawancara. Keempat, menulis dan mendeskripsikan hasil dari wawancara yang dituangkan dalam pelaporan penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexxy J meleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja 2014) hl 280

Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut karena informan yang dipilih harus sesuai dengan permasalahan yang diambil peneliti, sehingga perlunya pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi informan untuk penelitian dalam mempermudah peneliti mencari data yang diperlukan dan wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM batik Jetis Sidoarjo.

Tabel 3.2 Jadwal Wawancara

No	Tanggal	Lokasi Wawancara	Waktu Pelaksanaan	Nama Informan
1.	31 Mei 2022	Kelurahan desa Jetis	10.09 WIB	Slamet Riyadi, SH
2.	31 Mei 2022	Kelurahan desa Jetis	11.00 WIB	Akhmad Hariyadi, SH
3.	06 Juni 2022	Kelurahan desa Jetis	13.40 WIB	Yueni
4.	06 Juni 2022	Kelurahan desa Jetis	14.40 WIB	Agus Setiawan, S.Sos
5.	15 Juni 2022	Kelurahan desa Jetis	15.20 WIB	Samsul ma'arif
6.	16 Juni 2022	Rumah pengrajin	12.00 WIB	Amir Mulyono
7.	16 Juni 2022	Rumah pengrajin	13.40 WIB	Miati
8.	22 Juni 2022	Rumah pengrajin	14.10 WIB	Supiadi
9.	22 Juni 2022	Rumah pengrajin	15.30 WIB	Muntahar

### 3. Dokumentasi

Metode dalam pengumpulan data salah satunya dokumentasi, dokumentasi dari informan yang bersangkutan dalam penelitian tersebut. Tujuan dari dokumentasi untuk mendapatkan dokumen bisa berupa data, tulisan, gambar dan lain-lain dimiliki pihak yang bersangkutan yang berhubungan mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan UMKM batik di kampung batik Sidoarjo. Peneliti memakai metode dokumentasi dikarenakan untuk mempertemukan data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang relevan dari pemerintahan desa atau masyarakat setempat. Sarana yang digunakan dalam metode dokumentasi sendiri seperti handphone, bukucatatan, dan lain-lain untuk membantu lancarnya proses metode teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan peneliti disaat ada beberapa gambar atau dari kegiatan yang dilakukan masyarakat pembatik.

### F. Teknik Analisis Data

Mendeskripsikan hasil dari wawancara yang dilakukan pewawancara dengan informan yang dipilih peneliti sebagai objek dari penelitian yang akan dilakukan mengenai penelitian yang membahas tentang tata kelola pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan UMKM kampung batik Sidoarjo. Dalam teknik analisa data ada tiga cara yang dilakukan dalam penelitian yaitureduksi data, display data dan mengambil kesimpulan.<sup>26</sup>

#### 1. Reduksi data

Pada proses reduksi data yakni peneliti mengumpulkan informasi atau data mengenai tata kelola pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan UMKM kampung batik, memfokuskan data yang sesuai dengan permasalahan yang diambil, sehingga

---

<sup>26</sup> Ibid

peneliti lebih mudah mengetahui data-data yang sudah didapatkan dalam proses observasi, wawancara dengan informan yang dipilih. Setelah peneliti mendapatkan data yang dicari, peneliti menentukan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti tentang tata kelola pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan UMKM kampung batik Sidoarjo.

## 2. Display data

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya peneliti melakukan display data yakni peneliti mendeskripsikan atau membuat narasi data yang dipilih menjadi fokus penelitian dalam penelitian yang membahas tentang tata kelola pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan UMKM kampung batik Sidoarjo.

## 3. Penarikan kesimpulan

Sesudah display data yakni peneliti melakukan penarikan kesimpulan data yang diambil, dengan merumuskan data yang dihasilkan atau pembahasan dalam penelitian yang didapat peneliti selama sebelum kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan maupun sesudah.

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Setiap data yang didapat perlu dilihat tingkat keabsahan data agar dapat dibuktikan kebenarannya dan bisa dibuktikan keasliannya. Jadi ada beberapa uji keabsahan data penelitian kualitatif peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Yakni triangulasi sebagai pengecekan data agar mempunyai perbandingan. Menurut Denzim dalam triangulasi ada empat macam manfaat teknik triangulasi sebagai pengecekan data, pemanfaatan sumber teori dan penyidik :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan pembicaraan seseorang secara pribadi dan tidak.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan

apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode menurut Patton ada dua strategi yaitu:<sup>27</sup>

1. Bukti nilai perancangan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data.
2. Bukti nilai kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Jenis teknik Triangulasi selanjutnya yakni triangulasi teori menurut Lincoln bahwa mengenai fakta yang tidak bisa di lihat kebenarannya dengan teori satu atau banyaknya teori. Dalam hal ini analisis menguraikan hubungan dan menyertakan penjelasan dalam analisis suatu teori, maka peneliti wajib mencari pembandingan. Apabila peneliti membandingkan hipotesis dengan penjelasan pembandingan bukan berarti menghapus cara tersebut. Dengan kata lain penelitian menggunakan teknik triangulasi mengecek temuannya dengan membandingkan dari berbagai metode, sumber atau teori. Dengan begitu peneliti melakukan cara yakni :

1. Menyajikan bermacam-macam pertanyaan
2. Melakukan pengecekan dengan berbagai data
3. Memanfaatkan beberapa metode agar meninjau kebenaran tulisan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup> Dr. Sugiyono "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D" (Bandung, Alfabeta cv 2017) hl 229

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Batik Tulis Jetis Sidoarjo

Batik tulis di Sidoarjo sudah sejak lama dikenal dan ada pada tahun 1675, yang terletak setelah masjid besar Al –Abror di Desa Kauman atau banyaknya orang yang tau pasar Desa Kauman, pada waktu dulu ada seseorang bapak tua yang bernama Mbah Mulyadi beliau dikenal dengan keturunan Raja Kediri yang pergi ke Sidoarjo dengan alasan dicari orang Belanda. Dengan perjalanan Mbah Mulyadi menjadi pedagang yang bertempat di “*Pasar Kaget*” atau sekarang di sebutnya “*Pasar Jetis*”. Mbah Mulyadi di Kelurahan Jetis memberikan kontribusi baik untuk masyarakat. Batik Jetis sangat terkenal bahannya yang halus dan warna yang mencorok, kebanyakan motifnya ada gambar burung. Mbah Mulyadi merupakan seorang yang tidak lepas dari kampung Batik Jetis, seorang yang sudah diyakini masyarakat sekitar sebagai keturunan Raja Kediri yang lari ke Sidoarjo. Beberapa pendapat sejarah Mbah Mulyadi juga membangun masjid yang ada di daerah Jetis yakni Masjid Al-Abror. Dengan adanya masjid tersebut penyebaran Islam dimulai.

Kampung Batik Jetis Sidoarjo mempunyai ciri khas dengan batiknya yang memiliki warna mencolok beda dari daerah lain, serta warna dari batik Jetis sidoarjo yang memiliki warna lebih cerah sehingga masyarakat dari luar menyebutnya dengan bahasa (mencolok), pada tahun 1970 industri batik tulis merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Jetis Sidoarjo, sebagian masyarakat Jetis merupakan pengrajin batik. Di tahun 2007 produksi batik Jetis Sidoarjo mengalami pencapaian yang merosot dikarenakan

peminat untuk membuat batik tidak banyak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu yang awalnya pengrajin mencapai 100 sekarang hanya separuh dari capaian sebelumnya. Batik Jetis Sidoarjo sudah terkenal cukup lama dan banyak peminatnya, seperti dasar warnanya yang dicampur dengan warna-warna lain untuk membuat ciri khas batik Jetis yang berbeda dari daerah lain. Dari mulai warnanya motifnya yang bermacam-macam dan semua sisi motif batik Jetis Sidoarjo ada gambar burungnya menjadi ciri khas batik Jetis Sidoarjo.

## 2. Jenis-Jenis Pelestarian UMKM Batik Jetis Sidoarjo

### a. Nama Pengrajin Batik

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Amir mulyono	Pemilik/ pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidarjo
2.	Miati	Pengrajin	Candi Sidoarjo
3.	Supiadi	Pemilik/pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo
4.	M. Fathul D	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 09 Sidoarjo
5.	Tohirin	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo
6.	Ningsih	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo
7.	Sholehuddin	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo
8.	Fatikhun amin	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo

9.	Muntahar	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 09 Sidoarjo
10.	Kholil	Pengrajin	Kelurahan Jetis Rw 10 Sidoarjo

Tabel 4.1 Nama pengrajin

b. Alat- alat dalam pembuatan batik yaitu :

1. Bandul

Fungsinya untuk menahan kain setelah di batik

2. Dingklik

Yaitu tempat duduk untuk pengrajin

3. Gawangan

Yaitu tempat untuk menggantungkan kain batik

4. Taplak

Yaitu untuk melindungi pembatik dari tetesan bahan panas untuk membatik

5. Wajan

Yaitu tempat untuk mencairkan malam, tempat tersebut terbuat dari logam

6. Kompor Kecil

Yaitu alat untuk mengasilkan api, fungsinya untuk pemanas bahan-bahan untuk membatik

7. Saringan malam



Yaitu alat yang berfungsi untuk menyaring malam

8. Canting

Yaitu alat untuk melukis atau menulis pola batik di kain atau yang di sebut mori

9. Malam/lilin

Bahan yang digunakan untuk membatik

10. Pewarna

Yaitu warna untuk mewarnai hiasan kain batik.

c. Motif-motif batik

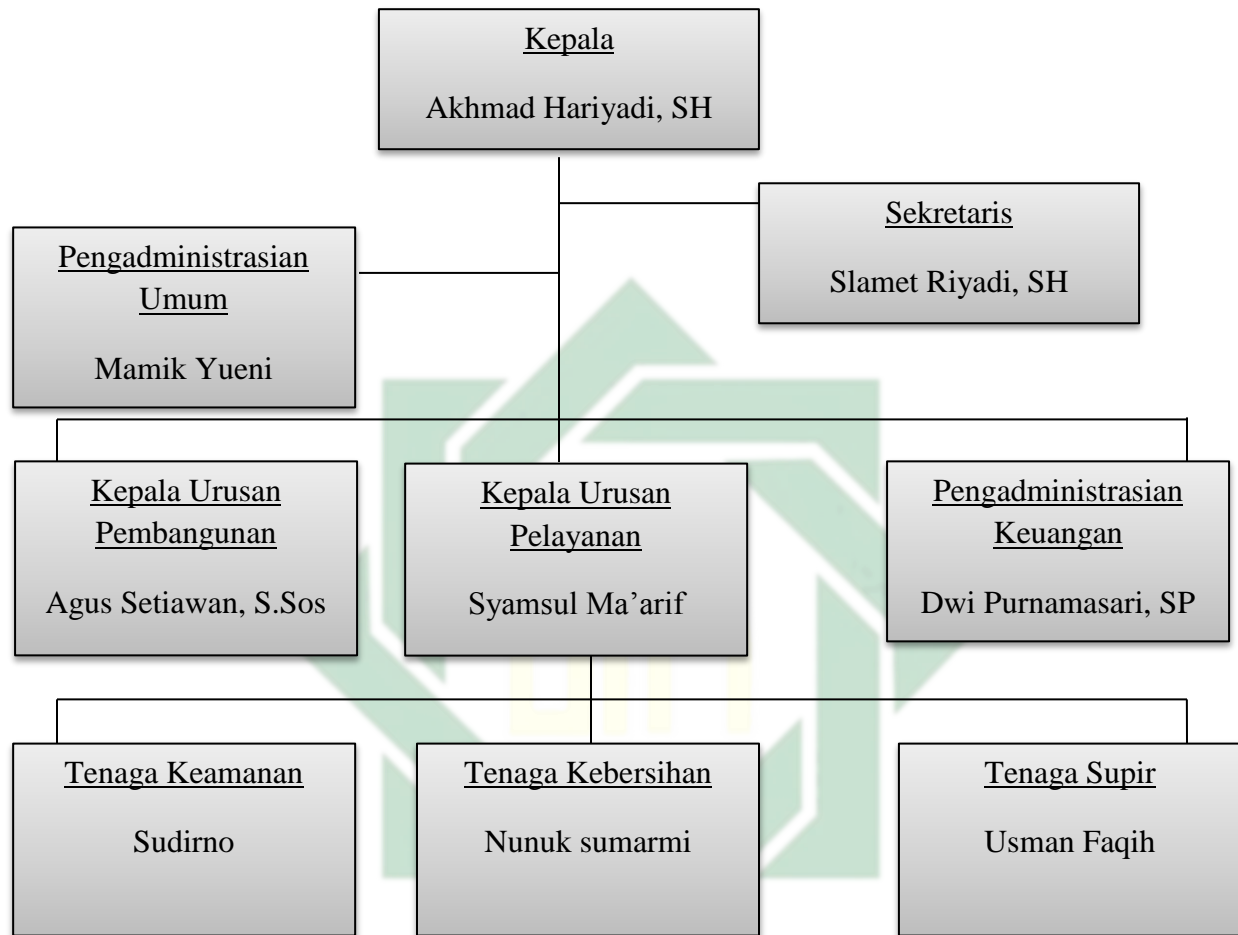
1. Motif burung merak
2. Motif sekardangan
3. Motif kembang bayem
4. Motif sandang pangan
5. Motif kembang tebu



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### 3. Struktur Pemerintahan Kelurahan

Tabel. 4.2



### 4. Tahapan Pemberdayaan dalam Tata Kelola Pemerintahan

Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson yaitu :

- a. Tumbuhnya keinginan dalam diri seseorang untuk berubah, merupakan titik nomor satu dalam upaya pemberdayaan.
- b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya

perubahan dan perbaikan yang diinginkan.

- c. Mengembangkan minat untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang menghasilkan manfaat untuk kehidupan.
- d. Meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan.

#### 5. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budaya. Menurut Mardikanto :

- a. Perbaikan kelembagaan : dengan adanya perbaikan suatu kegiatan yang dilakukan mengharapkan perbaikan kelembagaan termasuk pengembangan jejaring mitra usaha.
- b. Perbaikan usaha : Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan : terjadinya perbaikan suatu bisnis diharapkan bisa memperbaiki pendapatan masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan : setelah perbaikan pendapatan berkaitan dengan perbaikan lingkungan sosial, karena penyebab dari buruknya lingkungan sosial masyarakat yakni banyaknya kemiskinan.
- e. Perbaikan kehidupan : baiknya perkembangan lingkungan dan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat.

- f. Perbaiki masyarakat : apabila kehidupan berjalan dengan baik sesuai dengan usaha masyarakat maka menimbulkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

#### 6. Strategi pemberdayaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan harus ada strategi atau langkah-langkah menurut Mardianto yaitu :

- a. Sebagai suatu rencana
- b. Sebagai kegiatan yang unggul
- c. Sebagai suatu instrumen
- d. Sebagai pola pikir

Strategi pemberdayaan merupakan cara untuk bisa mencapai dalam pemberdayaan yang dilakukan yaitu pemberdayaan UMKM batik. Strategi tersebut dibutuhkan supaya pemberdayaan berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 7. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Suatu unit usaha yang dilakukan oleh setiap individu atau badan usaha ekonomi. usaha mikro kecil menengah berdasarkan :

- a. Berkelanjutan
- b. Kekeluargaan
- c. Demokrasi ekonomi
- d. Berwawasan lingkungan yang mandiri

Dengan begitu pengembangan UMKM memiliki tujuan mengembangkan perekonomian yang seimbang, menjadikan usaha yang tangguh meskipun banyaknya permasalahan sosial, meningkatkan peran UMKM dengan

memperbanyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat, meratakan pendapatan masyarakat untuk baiknya kelangsungan hidup masyarakat. Pandemi mengakibatkan turunnya suatu usaha seperti dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Peneliti menjelaskan terkait tiga kegiatan tersebut :

- Kegiatan produksi

Proses kegiatan yang mengeluarkan hasil, kegiatan tersebut memiliki tujuan sebagai penambahan nilai dari suatu usaha atau barang tersebut. Seperti dalam adanya pandemi Covid menyebabkan pembatasan pelatihan, yang mana kegiatan tersebut menjadi bekal kemampuan pembatik.

- Kegiatan distribusi

Suatu proses penyaluran pada masyarakat, kegiatan tersebut mempunyai tujuan untuk penyaluran barang pada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran usaha batik Jetis sudah banyak dilakukan salah satunya diberbagai toko batik yang ada disekitar kampung Jetis.

- Kegiatan konsumsi

Kegiatan yang menggunakan hasil, merupakan kegiatan dimana nilai guna barang menjadi kurang untuk terpenuhnya kebutuhan.

## **B. Pemerintahan Kelurahan Dalam Pengelolaan UMKM batik**

Tindakan yang memfokuskan diri dari reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi.<sup>28</sup> Strategi mempunyai manfaat atau tujuan seperti memudahkan

---

<sup>28</sup> <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-srategi/> di akses pada tanggal 27 mei 2022 pukul 22.44

perencanaan, mudanya pencapaian suatu yang di lakukan, menjadi sarana evaluasi juga untuk pengelolaan Umkm batik di Kelurahan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam apa yang di kerjakan. Menjadikan berkembangnya kreativitas dan inovasi di Kelurahan dalam pengelolaan Umkm batik. Pemerintah kelurahan dalam mengelola UMKM batik memiliki suatu perencanaan, adapun strategi perencanaan menjadi alat untuk membantu mengembangkan usaha batik, baik dari pemerintahan Kelurahan yang ikut terlibat dari pengembangan usaha batik tersebut. Adanya perencanaan dalam pemberdayaan UMKM batik diharapkan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih untuk masyarakat pembatik, dengan begitu rencana adanya perencanaan fokus untuk cara-cara yang dilakukan untuk mengembangkan usaha batik. Dalam kegiatan perencanaan dalam pemberdayaan UMKM batik peran pemerintah agar merancang atau membantu rencana yang dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya

1. Cara pemerintah kelurahan dalam mengelola UMKM batik

Adanya pemerintah Kelurahan dapat membantu dalam tata kelola pemberdayaan UMKM batik, yang dilakukan pemerintahan Kelurahan untuk mengelola usaha batik sangat antusias sekali dikarenakan usaha batik sendiri terlihat manfaatnya seperti membantu perekonomian masyarakat, juga menjadikan tenaga masyarakat atau pengrajin itu tidak berhenti menghasilkan karya Budaya Indonesia. Pengelolaan sendiri yaitu sebagai proses dalam kegiatan dan dilaksanakan secara efektif.<sup>29</sup> Sebagaimana tanggapan dari narasumber Bapak

---

<sup>29</sup> Rita mraiya, *Pengelolaan lingkungan belajar*, (Jakarta : kencana 2010) hal 16

Slamet Riyadi, SH selaku sekretaris kelurahan

“Caranya seperti kita membantu pengrajin agar batik di kenal tidak hanya dengan masyarakat sidoarjo namun seluruh masyarakat Indonesia, karna batik Jetis adalah satu icon Sidoarjo ya mas, seperti sekarang seluruh pegawai atau guru di haruskan setiap hari senin, selasa dan jumat harus memakai batik. Karena apa dengan hal itu tadi sebagai bentuk cara kita mengelola, melestarikan batik Jetis ya mas. Suatu kebanggaan juga Sidoarjo memiliki ciri khas yang di gunakan untuk melestarikan usaha pengrajin batik”

Dengan jawaban narasumber yang menjawab tentang cara pengelolaan batik dengan cara membantu masyarakat sendiri dengan memperkenalkan tidak hanya untuk masyarakat Sidoarjo melainkan masyarakat seluruh Indonesia, menurut prinsip tata kelola yang baik keterbukaan (*Transparency*) yakni adanya keterbukaan dalam semua tindakan untuk mengenalkan produk batik Sidoarjo kepada masyarakat lainnya. Dengan begitu tindakan yang terlaksana memperoleh timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, tindakan tersebut mengupayakan peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat. Begitupun pengerjaan yang menguatkan sumber daya manusia.

Dengan waktu yang berbeda peneliti mewawancarai narasumber yakni Bapak Akhmad Hariyadi, SH selaku Kepala kelurahan:

“Pengelolaan batik jetis terkait pemerintah terlibat mas, adanya perkembangan batik itu seperti kita membantu dalam hal caranya untuk mengembangkan seperti memasarkan batik agar bisa di kenal banyak orang, untuk acara-acara event itu masih belum ada karna mungkin terkait pembatiknya sendiri dalam pemasaran sudah mempunyai cara sendiri untuk menjual belikan”

Pengelolaan batik Jetis sendiri juga melibatkan pemerintah Kelurahan, dibantu dengan cara mempromosikan jual beli secara online tidak hanya offline saja lebih gampang untuk mempermudah masyarakat batik Sidoarjo, itupun didalam prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan (*Transparency*) menjamin kemudahan atas

informasi-informasi yang diperoleh seperti informasi tentang batik Jetis Sidoarjo yang sudah sebagian banyak dikenal masyarakat. Bisa diakses untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagian masyarakat yang mengetahui batik Jetis Sidoarjo, maka dari itu memperkenalkan batik penting dilakukan untuk masyarakat sekitar Sidoarjo maupun tidak. Seperti pengadaan event-event yang berkaitan dengan mempopulerkan batik mempermudah dalam pengenalan batik yang menjadi salah satu icon Sidoarjo.

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan Ibu Yueni selaku Pengadministrasian Umum kelurahan:

“Partisipasi pemerintah Kelurahan yang harus selalu diutamakan untuk halnya membantu masyarakat pengrajin batik, jadi jangan menyepelkan pengrajin karna tidak semua masyarakat Sidoarjo bisa membatik”

Bapak Agus Setiawan, S.Sos selaku Kepala urusan pembangunan/pemberdayaan yang diwawancarai peneliti saat proses wawancara dan menjelaskan terkait pengelolaan:

“Ya seperti ikut serta dalam membantu perkembangan batik mas, contoh kemarin pandemi pembatik mengalami penurunan dalam pemasaran karena masnya tau sendiri saat pandemi produksi terhambat hal itu menyebabkan pembatik mengalami penurunan. Upaya pemerintahan kelurahan membantu melestarikan budaya batik agar tidak mati dengan melakukan keikutsertaan masyarakat agar lebih mengenal, bisa membeli batik Sidoarjo sendiri, sistem waktu pandemi kan tidak boleh berkerumun”

Dalam prinsip tata kelola (*Transparecy*) yakni keterbukaan dalam perkembangan batik, pelaksanaannya, menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang membantu perkembangan umkm batik, membantu saat menurunnya hasil capaian pemasaran batik. Serta prinsip tata kelola yang baik pertanggungjawaban (*Responsibility*) menerapkan pertanggungjawaban untuk masyarakat dengan perkembangan batik Jetis Sidoarjo, adanya ketentuan atas pertanggungjawaban yang



dilakukan. Bisa menghindari segala sesuatu yang bisa menjadikan perkembangan tidak berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, harus di jalankan sesuai peraturan yang ada dalam tata kelola.

Sebagaimana juga tanggapan dari narasumber Bapak Samsul Maarif selaku Kepala urusan pelayanan kelurahan:

“Membantu mas terkait pengelolaan UMKM batik Jetis ya, seperti adanya kegiatan yang diadakan anak-anak KKN dulu pemerintah kelurahan diikuti sertakan mengembangkan batik”

Hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dapat disimpulkan peneliti yakni terkait adanya cara dari pengelolaan umkm batik, pemerintah kelurahan mengupayakan membantu pengelolaan UMKM batik agar tidak punah sebagai icon Kabupaten Sidoarjo, karna batik sendiri merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Jetis yang menopang perekonomian masyarakat menjadi program strategis untuk pengelolaan atau pemberdayaan UMKM batik.

## 2. Peranan pemerintah kelurahan dapat membantu dalam pemberdayaan batik

Pemberdayaan yaitu proses di mana tujuannya untuk memperkuat masyarakat yang mengalami suatu masalah seperti masalah perekonomian, dengan tujuan agar perekonomian masyarakat tercukupi dengan begitu masyarakat harus mempunyai skill atau kelebihan untuk bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari yang secara sosial ataupun ekonomi. Usaha batik merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat, dengan bagitu adanya pemberdayaan UMKM batik menghasilkan perekonomian yang baik dan tata kelola dari pemerintah kelurahan yang baik.

Sebagaimana tanggapan dari Bapak Slamet Riyadi selaku Sekretaris kelurahan saat

diwawancarai peneliti:

“Peranan pemerintah ya mas untuk pemberdayaan sendiri adanya pemerintahan menurut saya membantu pemberdayaan tersebut, kita melakukan sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan untuk yang punya usaha batik ya mas soalnya waktu pandemi kemaren tidak boleh banyak orang jadi terkadang ada pelatihan untuk pengrajin yang datang hanya yang pemilik usaha”

Juga dari tanggapan Bapak Akhmad Hariyadi, SH selaku Kepala Kelurahan saat wawancara dengan peneliti:

“Sangat membantu karena masyarakat dalam pemberdayaan batik juga tidak bisa sendiri pasti membutuhkan bantuan dari pemerintahan kelurahan entah itu bantuan berupa apapun yang bisa mengembangkan pemberdayaan batik, pemerintah memiliki peranan dalam adanya pemberdayaan batik”

Tidak jauh berbeda dari sebelumnya dan tanggapan narasumber selanjutnya yakni ibu Yueniselaku administrasi umum kelurahan:

“Ada peranan, pemerintah membantu pemberdayaan umkm batik seperti SDM mas”

Tanggapan Bapak Agus Setiawan, S.Sos selaku Kepala urusan pembangunan/pemberdayaan saat wawancara dengan peneliti:

“Pemberdayaan mas, peranannya ada pemerintah kelurahan dan sangat membantu untuk sumber daya manusia, pengelolaan pemerintah juga ikut andil dalam hal itu. Seperti adanya pelatihan masa itu membantu dalam pemberdayaan UMKM batik”

Begitupun tanggapan dari Bapak Samsul Ma'arif selaku Kepala urusan pelayanan saat wawancara dengan peneliti:

“Membantu, ada masa peranannya untuk pemberdayaan batik apalagi. Karna batik Jetis salah satu batik yang terkenal atas Nama Sidoarjo ya mas, pemerintah kelurahan membantu andil dalam masalah pemberdayaan sangat ada peranannya”

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa terkait peranan pemerintah kelurahan dalam upaya pemberdayaan batik, pemerintah punya cara tertentu untuk memngupayakan pemberdayaan batik, pemerintahan peranannya

sangat ada untuk masyarakat pengrajin batik. Dengan membantu dalam peningkatan perekonomian juga, sumber daya manusia (SDM) pun terbantu. Karena dalam hal tersebut menyebabkan atau menjadikan masyarakat menjadi makmur atas kelancaran sumber perekonomiannya.

Dalam pemberdayaan juga tidak hanya mementingkan suatu individu tertentu melainkan untuk melestarikan budaya Indonesia yaitu batik.

### 3. Pertemuan untuk membahas pemberdayaan pengrajin Batik

Batik merupakan budaya Indonesia, tidak hanya dikenal didalam negeri tetapi juga dikenal di luar Negeri, eksistensi batik dalam masyarakat Indonesia sangat ditunjang oleh perkembangan batik itu sendiri.<sup>30</sup> Perkembangan batik sendiri bermacam-macam dari mulai segi motif ataupun dalam pewarnaan batik yang menunjang harga batik terkisar bisa mahal dan bisa murah. Adanya pertemuan dalam usaha batik membantu mempermudah pembatik dalam menjalankan usahanya, karena adanya pertemuan untuk membahas pemberdayaan terlaksana dengan baik.

Begitupun wawancara peneliti dengan narasumber yakni Bapak Slamet Riyadi, SH selaku Sekretaris Kelurahan yang akan membantu melengkapi data yang dicari peneliti:

“Ada mas, 3 bulan kemaren pelaksanaannya pertemuan meskipun lewat zoom meeting”

Wawancara dengan Bapak Akhmad Hariyadi, SH selaku Sekretaris yang membantu

---

<sup>30</sup> Noffi Fitriyani, Skripsi “Peranan Pengrajin Dalam Pelestarian Batik Kudus” (Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Semarang 2015) hl 12

menjawab pertanyaan peneliti:

“Ada tetapi tidak terlalu sering mas, karna kemarin pandemi jadi tidak terlalu sering mengadakan pertemuan”

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan Ibu Yueni selaku administrasi umum yang sedang menjawab pertanyaan peneliti:

“Tiga bulan kemaren ada, tetapi hanya dibatasi karna waktu pandemi dan ada yang lewat zoom meeting itu antusias sekali pemerintah kelurahan dalam pertemuan tersebut”

Dan pada waktu yang lain, Bapak Agus Setiawan, S.Sos selaku Kepala pembangunan/pemberdayaan membantu memaparkan penjabarannya yakni:

“Empat bulan kemarin atau 3 bulan ada pertemuan dengan masyarakat pembatik, pemerintah kelurahan pas adanya anak KKN juga mengadakan pertemuan tersebut”.

Tidak jauh berbeda pemaparan Bapak Samsul Ma'arif selaku kepala pelayanan, sebagai berikut:

“Ada bulan kemaren untuk proses pengelolaan batik Jetis mas”

Maka dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertemuan untuk pemberdayaan batik ada tetapi tidak terlalu sering dilaksanakan, dengan upaya pemerintah kelurahan seperti itu sudah baik dalam penanganan pemberdayaan UMKM batik. Awal dari proses pemberdayaan pengrajin batik.

#### 4. Hambatan saat proses pengelolaan UMKM batik

Dalam proses yang kita lakukan, seperti proses membatik, mengelola dan melestarikan pasti terdapat kendala. Bukan hanya itu hambatan dari setiap proses apapun yang kita kerjakan itu berbeda sesuai yang kita jalankan, seperti proses pengelolaan batik yakni mempunyai hambatan dari ketersediaan bahan membatik yang belum lengkap dan berkurangnya pengrajin batik juga menyebabkan produksi batik hanya sedikit. Maka dari itu kendala akan muncul setiap pekerjaan yang kita

kerjakan, dalam membuat juga pasti adanya hambatan. Hambatan saat pandemi covid juga menyebabkan proses produksi batik menurun tidak seperti hari biasanya, hambatan seharusnya bisa kita hadapi dan bisa kita carikan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut, dengan mengupayakan kurangnya pekerjaan yang akan kita lakukan.

Bapak Slamet Riyadi, SH selaku Sekretaris kelurahan dalam wawancara dengan peneliti terkait hambatan yang dihadapi yaitu:

“Kendala pandemi mas contoh kemaren, produksi menurun sehingga tidak menghasilkan keuntungan yang banyak beda dengan sebelum pandemi pemasaran tidak terhambat dan berjalan sesuai stok yang diperlukan, maka adanya pandemi menjadi salah satu faktor menurunnya perekonomian masyarakat”

Juga pemaparan dari Bapak Akhmad Hariyadi, SH selaku Sekretaris yang menjelaskan hambatan proses pengelolaan batik:

“Terkendala waktu mas dalam proses pengelolaan seperti adanya pandemi kemarin ada batasan tidak boleh berkerumun di batasi melakukan kegiatan di luar ruangan itu menjadi kendala dalam proses pengelolaan”

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan Ibu Yueni selaku administrasi umum mengenai kendala yang dihadapi yaitu:

“Sulitnya mencari agenda dikarenakan waktu dan saat pandemi yang mengharuskan apa-apa dibatasi, sebelumnya sebelum pandemi untuk proses pengelolaan mempunyai kendala yang tidak banyak seperti waktu pandemi”

Begitupun pemaparan dari Bapak Agus Setiawan, S.Sos selaku Kepala urusan pembangunan/pembudayaan dalam wawancara dengan peneliti yakni:

“Kendalanya saat pandemi ya tidak ada kegiatan yang mengharuskan tatap muka” Juga pemaparan terkait kendala, dari Bapak Samsul Ma’arif selaku Kepala pelayanan yakni:

“Kendala mas, dalam pengelolaan kurangnya partisipasi dalam perkembangan pengelolaan UMKM batik, seperti dalam pemasaran seharusnya menggunakan cara agar dalam pemasaran tersebut meningkat dari

tahun ke tahun, seperti mengikutsertakan ke event-event di luar Sidoarjo itu mempunyai manfaat agar batik tersebut bisa di kenal banyak orang”

Berikut hasil penelitian dilapangan dan melihat pemaparan para narasumber maka disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi muncul saat adanya pandemi dikarenakan pada waktu pandemi mempunyai banyak waktu dan batasan untuk upaya pengelolaan, pemberdayaan serta perkembangan yang dilakukan dalam upaya untuk membuat batik menjadi berkembang dan tidak punah.

#### 5. Solusi mengatasi hambatan pengelolaan UMKK batik

Sebelum adanya solusi pasti ada hambatan, baik solusi itu mengembangkan atau tidak. Jadi solusi membantu kendala yang sedang kita hadapi. Dalam proses pengelolaan batik mempunyai kendala dan solusinya agar tingkat produksi batik lebih banyak agar dalam produksi tidak mengalami penurunan, dengan begitu mengusahakan melakukan pemenuhan untuk pengrajin juga membantu kendala yang dihadapi.

Bapak Slamet Riyadi, SH selaku Sekretaris dalam wawancara dengan peneliti yang menjelaskan solusi dari hambatan pengelolaan batik yaitu:

“Solusinya menurut saya lebih ada kegiatan yang mendorong adanya pengelolaan batik, terlebih ada pandemi kita mengupayakan untuk bagaimana cara meskipun adanya pandemi kita harus melakukan pengelolaan yang maksimal agar tidak terjadi penurunan pendapatan masyarakat”

Begitupun pemaparan Bapak Akhmad Hariyadi, SH selaku Kepala saat wawancara dengan peneliti:

“Solusi dari hambatan tadi mengupayakan saja karna memang saat pendemi yang menyebabkan kendala itu muncul, untuk selebihnya sudah baik masa dalam tatanan pengelolaan untuk pemberdayaan batik”

Tanggapan Ibu Yueni selaku pengadministrasian umum mengenai solusi dari hambatan pengelolaan umkm batik yaitu:

“Mengadakan pelatihan, karena dalam waktu kemarin adanya pandemi menyebabkan pelatihan terhenti di karenakan batasan waktu dan tempat. Jadi memaklumi hambatan tersebut untuk waktu sekarang dalam proses pengelolaan alhamdulillah berjalan lagi”

Dengan begitu kesimpulan dari tanggapan diatas yakni terkait solusi dalam hambatan yang dihadapi memang dengan mengupayakan kegiatan yang menghasilkan manfaat pengelolaan umkm batik, tidak menyalakan waktu dan kondisi dikarenakan waktu pandemi juga jadi tidak memaksakan banyaknya kegiatan yang berlangsung meskipun kegiatan tersebut juga penting dalam pengelolaan UMKM batik.

### **C. Keterlibatan Masyarakat dalam Melestarikan Usaha Batik di Tengah Pandemi**

Batik merupakan karya atau warisan budaya bangsa Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya, harus kita kembangkan warisan negara kita Indonesia. Batik juga menjadi bahan berkembangngnya ekonomi pengrajin. Melestarikan usaha batik dipermukiman kelurahan memang tidak banyak dijumpai, selain dengan waktu yang menghambat perkembangan usaha batik dimanapun dengan kondisi di tengah adanya pandemi membuat tidak semangat dalam meedukasi atau mensosialisasikan karya Indonesia yakni batik dimanapun. Pengrajin pun menyelamatkan warisan budaya dengan melakukan beberapa cara agar usaha batik masih berkembang meskipun ditengah wabah virus corona, seperti dari sisi ekonomi, batik merupakan kontribusi cukup banyak untuk masalah perekonomian nasional. Pelestarian batik bermanfaat agar batik lebih banyak dikenal atau diminati semua orang tidak hanya orang Indonesia saja.

## 1. Pelaksanaan dalam melestarikan usaha batik saat pandemi

Industri batik adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan dari kementerian perindustrian.<sup>31</sup> Karna usaha batik sendiri menjadikan faktor perekonomian masyarakat melonjak tinggi karna dalam hasil membatik bisa diekspor dan ekspor tersebut mencapai sangat tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, jadi meskipun adanya pandemi tetapi industri batik masih tetap berlanjut dan tidak sampai berhenti karna adanya beberapa cara atau solusi untuk menangani faktor penghambat dari industri batik itu sendiri. Tanpa adanya cara untuk melestarikan usaha batik, usaha batik akan terhenti pada waktu pandemi. Dengan begitu dari tanggapan saat wawancara Bapak Amir Mulyono selaku pemilik usahabatik sebagai berikut:

“Pelaksanaannya bertahap mas, sesuai apa yang diperlukan saat masa pandemi apabila dalam produksi mengalami masalah ya kita mencari jalan keluarnya, pemasaran yang di batasi karna kemarin adanya ppkm jadi untuk pengiriman juga tersendat tidak tepat pada waktunya, sudah mengupayakan pelaksanaan dengan baik dikarenakan pelestarian batik juga berpengaruh dalam faktor perekonomian”

Begitupun tak jauh beda pendapat Ibu Miati selaku pengrajin batik:

“Untuk melestarikan batik mas sangat diperhatikan sekali seperti proses nya, perkembangannya di karenakan prosesnya yang bertahap mas, megindahkan model batik dengan kreatif mungkin mas itu juga termasuk pelaksanaan pelestarian usahabatik saat pandemi”

Wawancara dengan peneliti Bapak Supiadi juga selaku pengrajin batik:

“Pelestarian batik juga seperti memakai batik khas Sidoarjo sendiri, membeli dan berpartisipasi dalam pemasaran batik juga termasuk menjadi pelaksanaan dalam melestarikan batik saat. Dengan hal tersebut membantuk

---

<sup>31</sup> <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22039/Dilanda-Pandemi-Ekspor-Batik-Indonesia-Mampu-Tembus-USD-21,5-juta> di akses tanggal 2 Juni 2022



dalam bentuk produksi menghabiskan stok yang terhambat saat pandemi”

Bapak Muntahar selaku pengrajin batik dalam wawancara dengan peneliti yakni mengatakan:

“Melestarikan batik ya masyarakatnya mas harus ikut serta berpartisipasi entah itu membantu dalam bentuk pengelolaan, pengembangan maupun pemasaran. Karna pengrajin sendiri yang melakukan hal itu semua sendiri ya tidak bisa mas harus ada tangan lain yang membantu bukan dengan pekerjaan koita sendiri mas”

Dilihat dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam upaya dalam melestarikan usaha batik dikampung batik Jetis Sidoarjo sangat dibutuhkan untuk industri batik saat pandemi, melestarikan batik juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar maupun luar, seperti memakai batik ikut serta meramaikan pameran batik apabila ada, mencintai budaya sendiri juga membantu pelestarian usaha batik saat pandemi. Dalam waktu pandemi yang terlebilang menurunkan pendapatan pemasaran batik dikarenakan batasan pengiriman dan pembeli yang berkurang. Maka tindakan yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu melestarikan batik saat masa pandemi yakni berpartisipasi dalam mencintai budayanya sendiri, memakai batik agar dikenal kalau batik itu dari Indonesia dengan begitu untuk pelestarian batik tidak direbut negara lain.

## 2. Manfaat pelestarian usaha batik untuk organisasi usaha

Manfaat pelestarian usaha batik dalam organisasi usaha dapat untuk individu pengrajin batik (karyawan), serta pemilik usaha batik<sup>32</sup> Manfaat usaha batik untuk idividu (karyawan) sendiri selain meningkatkan perekonomian juga dapat mengembangkan pemahaman pengrajin individu batik dalam proses pembuatan

---

<sup>32</sup> Yosi Wulandari, Skripsi : *Upaya Pengembangan Pengrajin Batik Di Desa Wisata Batik Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progol* (fakultas pendidikan universitas negeri yogyakarta, 2017) hal 109

batik, pengrajin dapat percaya diri dalam bekerja di usaha batik, pengrajin batik dan pemilik usaha dapat merasa yakin akan industri yang dikerjakannya akan berkembang. Manfaat pelestarian usaha batik untuk organisasi usaha memudahkan pemilik usaha batik dalam mengelola karyawan yang bekerja di usaha batik tersebut dapat bekerja dengan efektif. Pengrajin batik dapat memuaskan pesannya pelanggan serta meningkatkan produksi batik, penghasilan atau omzet organisasi usaha dengan adanya manfaat pelestarian usaha batik untuk organisasi usaha.

Berikut pemaparan dari Bapak Amir Mulyono selaku pengrajin batik saat wawancara dengan peneliti:

“Manfaatnya memudahkan pemilik usaha batik dalam mengordinir karyawannya, dengan begitu juga mengembangkan pendapatan usaha batik”

Tidak jauh berbeda, tanggapan Ibu Miati selaku pengrajin batik yaitu:

“Bisa membantu mengatur karyawan juga, mengatur bagaimana pengerjaannya dan perkembangan batik. Membantu omzet usaha batik membantu berjalannya karyawan dalam membuat motif batik yang baru”

Seperti yang diungkapkan narasumber selanjutnya Bapak Supiadi selaku pengrajin batik:

“Membantu mengasah pengrajin dalam membuat batik, mendapatkan ketrampilan yang mampu membuat pembatik menjadi lebih mengaryakan motif batik lebih baru. Dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik”

Bapak Muntahar selaku pengrajin batik saat wawancara dengan peneliti:

“Dapat memenuhi permintaan pasar, dapat juga meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan usaha batik. Bisa juga bekerja baik dalam pengerjaan usaha batik”

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat dilapangan serta melihat tanggapan manfaat pelestarian batik untuk organisasi usaha di Kelurahan Jetis Sidoarjo yakni membuat pengrajin menjadi sangat kreatif dan pekerjaan yang sangat baik. Meningkatkan omzet usaha dan membantu proses pengrajin untuk mengelola

usaha batik yang ada di Kelurahan Jetis Sidoarjo.

### 3. Hambatan keterlibatan masyarakat di tengah pandemi

Penghambat dari pelestarian batik ditengah pandemi di Kelurahan Jetis Kabupaten Sidoarjo, dimana dengan adanya faktor penghambat juga beresiko untuk pelestarian usaha batik, beresiko untuk produksi usaha batik ditengah pandemi. Faktor-faktor penghambat juga di jadikan 2 yakni, faktor internal dan faktor eksternal.<sup>33</sup> Di antaranya:

#### 1. Faktor penghambat internal

Pengusaha batik masih dalam hal pemasaran yang cukup terbatas dengan adanya pandemi covid 19. Dengan tidak sering produksi usaha batik lagi saat pandemi menyebabkan usaha batik mengalami penurunan, selain itu faktor internal dari penghambat pelestarian batik yakni pengrajin atau tenaga pembatik juga terbatas dikarenakan pandemi dan tidak terlalu sering pekerjaan untuk membuat batik yang baru. Oleh karena itu faktor penghambat internal juga harus diperhatikan untuk berjalannya pelestarian usaha batik saat pandemi.

#### 2. Faktor Penghambat Eksternal

Untuk faktor penghambat eksternal, pelestarian pengrajin batik untuk usaha hanya dilakukan diorganisasi usaha seperti adanya pelatihan bukan dari kelurahan melainkandari luar kelurahan yakni, tidak semua pengrajin diikutkan dikarenakan peserta dibatasi. Dengan begitu pelatihan yang terbatas menyebabkan tidak ada pelatihan untuk pengrajin dalam pembuatan motif batik. Dengan begitu disimpulkan bahwa salah satu solusi penghambat eksternal

---

<sup>33</sup> Ibid

tersebut, membuka kuota banyak untuk pelatihan pembatik setelah pandemi selesai. Karna partisipasi masyarakat mengikuti hal tersebut sangatlah diperebutkan, penambahan informasi dan kemampuan suatu individu.

Sebagaimana ungkapan dari bapak Amir Mulyono selaku pemilik usaha batik di Kelurahan Jetis yakni:

“Penghambatnya seperti pembatik masih belum bisa membuat motif batik yang baru lagi, dalam penentuan warna juga saya masih ngikut pemilik batik mas karnadalam pewarnaan saya masih belum berani untuk membuat warna yang baru”

Tidak jauh berbeda dengan tanggapan narasumber selanjutnya yakni Ibu Miati selaku pengrajin batik Kelurahan Jetis:

“Penghambat kalau menurut saya seperti ada pelatihan untuk usaha batik yang ikut hanya pemilik batik, untuk pengrajin tidak maka dari itu kekurangan yang dialami dari pelestarian batik di tengah pandemi, penghambat pemasarannya juga terhambat karna adanya PPKM dulu pemasaran terhenti dan menyebabkan penurunan pendapatan pembatik”

Ada ungkapan saat wawancara dengan peneliti yakni Bapak Muntahar selaku pengrajin batik Jetis:

“Penghambat pelestariannya yakni seperti ada pelatihan untuk pengrajin di Kelurahan Jetis sini di batasi masa karna faktor kondisi pandemi jadi ada batasan yang mengharuskan hanya pemiliknya saja yang ikut”

Dengan dilihat penjelasan setiap narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelestarian usaha batik saat pandemi memang ada, saat pandemi pun penghambat pelestarian batik diusahakan tidak menjadikan penghambat dari pelestarian batik di Kelurahan Jetis. Karna usaha batik sendiri merupakan salah satu sumber ekonomi bagi pengrajin di Kelurahan Jetis. Adanya banyak perkembangan yang ada di usaha batik seperti pelaksanaan

pelatihan untuk membantu perkembangan pembatik dalam membatik.

#### **D. Analisis Pembahasan**

Pelaksanaan untuk pengelolaan pelestarian batik juga diupayakan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, partisipasi mereka yang sangat antusias dalam mempertahankan budaya Indonesia yakni batik, Kelurahan Jetis yang merupakan kampung batik di Sidoarjo. Sebagai tujuan pemberdayaan pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, memberikan motivasi, kreativitas. Pemberdayaan menjadi suatu proses yang identik dengan kekuasaan yakni istilah kekuasaan sendiri identik dengan kemampuan-kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, dari pemberdayaan UMKM menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi setiap pembatik, dari segi perekonomiannya dan kebutuhan yang di perlukan.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui kelurahan, dikarenakan keterbatasan mangatur rumah tangganya sendiri kelurahan melakukan beberapa upaya pemberdayaan sesuai dengan data wawancara yang dilakukan oleh peneliti diantaranya: pemerintahan daerah melakukan realisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang di jalankan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang diatur pada peraturan daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam perda tersebut terdapat program yang berfokus pada dana bergulir agar dapat sampai pada masyarakat pelaku usaha. Yang dilakukan adalah peningkatan dalam permodalan, perluasan akses program pinjam modal dengan bunga ringan, peningkatan pemberian dana bergulir serta peningkatan sarana prasarana agar mendukung kegiatan usaha mikro agar berjalan. Selain itu dalam

pelaksanaan pemerintahan kelurahan diwajibkan membeli serta memakai batik tulis asli Sidoarjo yang wajib digunakan pada hari kerja tertentu, kebijakan tersebut ditetapkan pemerintahan Kabupaten pada seluruh elemen dibawahnya dalam upaya pemberdayaan.

Pengembangan sumber daya manusia seorang manajemen Sumber Daya manusia harus mampu dikelola dengan baik agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan, tenaga kerja atau sumber daya yang dilihat sesuai kuantitas maupun kualitas sangat sekali berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang bersaing dalam UMKM diberbagai tempat, maka dari itu pemberdayaan harus mempunyai strategi perencanaan sumber daya manusia agar memperbaiki pengelolaan bisnis. Dengan terjadinya pengelolaan bisnis yang baik menghasilkan daya asing yang berkualitas diantara bisnis UMKM lain. Sumber daya manusia tidak akan berhasil jika tidak adanya rekrutmen yang berpedoman pada sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Kualifikasi khusus yang dibutuhkan dalam sumber daya manusia yaitu seperti kebutuhan yang dibutuhkan sumber daya manusia untuk jenis pekerjaan tertentu (tidak semua orang bisa melakukan), seperti kemampuan masyarakat membatik, kemampuan mengelola pengindustrian. Selain kualifikasi khusus ada juga kualifikasi umum terkait sumber daya manusia yaitu kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang digunakan secara umum untuk berbagai jenis aktivitas bisnis.

Seperti perubahan lingkungan yang selalu terjadi jika UMKM batik tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, maka lama kelamaan usahanya akan merugi, pemilik UMKM batik harus bisa menyadari bahwa berinvestasi pada SDM adalah kemutlakan yang harus dilakukan jika ingin usahanya tetap eksis. Jika salah satu keluarganya tidak mempunyai bakat membatik maka mau tidak mau mereka harus

melatih tenaga kerja yang bisa dipercaya dan memiliki visi-misi sama dengan pemilik. Yakni: pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Jenis pelatihan yang digunakan pemberdayaan UMKM batik yakni dengan pelatihan yang berhubungan dengan teknis membatik, pembaruan motif batik seperti : cap batik, pewarnaan batik, pencelupan batik, dan membuat ide motif batik yang terbaru. Selain itu ada pelatihan yang diluar membatik yakni, seperti pengelolaan sumber administrasi, cara pemasaran online maupun tidak online, dan pembuatan iklan promosi batik.

Pemberdayaan yang dikatakan Parson adalah proses seseorang yang belum memiliki ketrampilan atau pengetahuan yang cukup untuk berupaya diberdayakan agar meningkatkan kemandirian, maka dari itu sesuai fokus penelitian dari pemberdayaan yang dilakukan UMKM Kabupaten Sidoarjo yaitu : mengembangkan suatu usaha dan lembaga sosial.

#### 1. Mengembangkan usaha

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat dianalisis sesuai teori dari Edi Suharto mengenai pemberdayaan yaitu tujuan pemberdayaan untuk mengembangkan usaha. Pengembangan yang dilakukan pemerintahan Kelurahan yaitu meliputi pemasaran, sumber daya manusia dan masalah keuangan. Pengembangan usaha berjalan dengan baik, karena banyaknya masyarakat yang merespon usaha pemerintah kelurahan, ada konsekuensi dalam peraturan upaya pemerintahan dalam pengembangan UMKM yang memberikan kontribusi dalam pemberdayaan usaha batik. Cara yang dilakukan pemerintahan sebelum adanya pandemi melakukan pengembangan sumber daya manusia seperti yang dikatakan Kasi Bina Koperasi dan UKM dalam wawancara yaitu: “Kami (pemerintah)

melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM berupa mengadakan pelatihan, seminar sosialisasi, memberikan bantuan modal /barang serta memberikan fasilitas

a. Pemasaran

Mengembangkan usaha melalui pemasaran seperti mengadakan kegiatan event batik supaya batik dikenal masyarakat selain masyarakat Sidoarjo, karna ada banyak pengusaha batik yang meninggalkan usaha karena melalui masa sulit dalam mempromosikan batik, sehingga hal tersebut memberikan efek kerugian untuk usaha itu sendiri. Pada kegiatan event batik tersebut pemerintahan Kelurahan membantu dari prasarana untuk berhasilnya produk batik yang dikenalkan masyarakat. Termasuk menjadi upaya pemberdayaan salah satunya penyediaan sarana untuk memperlancar hasil produk masyarakat.

Dari teori yang dipakai peneliti yakni teori pemberdayaan menurut Edi Suharto dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terlaksana dengan sesuai apa yang diinginkan, karena banyak pembatik yang terlibat dalam kegiatan event-event juga pelatihan online. Sehingga para pembatik bisa dapat mengembangkan usaha yang sekarang mereka kerjakan.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia memberikan suatu pembinaan dan pelatihan kewirausahaan untuk perkembangan pemasaran produk batik.



Pemberdayaan menekankan seseorang memperoleh ketrampilan serta kekuasaan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik, sesuai teori yang diambil peneliti, pemerintah kelurahan memberikan sarana pelatihan kewirausahaan dalam membangun perekonomian masyarakat pembatik. Masyarakat pembatik juga antusias mengikuti pelatihan atau mengikuti event-event yang diadakan Kabupaten Sidoarjo.

c. Keuangan

Pemerintahan juga mencari solusi terkait keuangan dalam suatu usaha batik, agar pengelolaan usaha batik berjalan dengan baik. Pemodalan dicarikan solusinya agar bisa menangani permasalahan usaha yang dijalani masyarakat. Karena pelaku usaha batik mendapat bantuan fasilitas dari pemerintahan.

2. Penguatan lembaga sosial

Kemandirian dalam bidang usaha memerlukan kesiapan dalam penguatan lembaga sosial, politik maupun ekonomi, lembaga yang bergerak dibidang ekonomi memiliki kontribusi dalam potensi penggerakan perekonomian agar efektif dalam menjalankan usaha. Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) perlu dikembangkan, seperti dalam penumbuhan usaha perekonomian sesuai dengan karakteristik kemampuan perekonomian melalui :

- a. Menggali potensi ekonomi guna menumbuhkan peluang kerja untuk masyarakat.
- b. Akses permodalan untuk membantu pemodalan usaha yang dilakukan.

- c. Peningkatan akses teknologi dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mempromosikan produk usaha.
- d. Pengembangan akses informasi, informasi terbaru dalam dunia usaha agar usaha berjalan dengan baik dan tidak tertinggal zaman.
- e. Pendampingan masyarakat, dengan melihat keberlanjutan usaha, sampai masyarakat menjadi mandiri dalam menjalani usaha.

Penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat meliputi langkah nyata agar menjadikan masyarakat berdaya tidak kekurangan. Dikaitkan dengan teori diatas bahwa penguatan lembaga sosial berkontribusi menguatkan juga memberikan akses seperti akses informasi berlangsungnya kegiatan event batik atau pelatihan lainnya diberbagai daerah.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan didalam penelusian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan UMKM batik tulis di kampung batik tulis dikampung batik Jetis Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik melalui Tata kelola Pemerintahan Kelurahan. Sedangkan bentuk pemberdayaannya berupa pengembangan usaha UMKM (kerjasama pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan SDM, mengoptimalkan strategi distribusi, serta pemenuhan kebutuhan pembatik ) . Selain itu, adanya pemberdayaan sebagai upaya pemerintah kelurahan dalam proses mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM berbentuk penguatan lembaga sosial.

1. Pengelolaan UMKM batik yang di upayakan Kelurahan Jetis dengan pemberdayaan melalui pemasaran, pemberdayaan sumberdaya manusia karyawan dan keuangan. Dalam hal pemasaran pemerintahan kelurahan mengajak dan mengikutsertakan masyarakat sebagai pelaku UMKM yang sebagai pemilik maupun pekerja secara langsung dalam kegiatan pameran , serta event event yang di adakan setiap tahunnya, yang tidak lain untuk mengeksplor hasil dari bagian usaha pemberdayaan UMKM batik tulis Jetis. Dalam hal pemberdayaan sumberdaya manusianya pemerintahan Kelurahan melakukan sosialisasi pelatihan terhadap pelaku UMKM serta pemberian informasi terhadap pengusaha maupun pengerajin batik tulis Jetis dikampung batik sebagai bentuk keterbukaan. Sedangkan dalam pemberdayaan keuangannya. Pemerintah

melakukan dana gulir atau pinjaman terhadap masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan usaha batik. Ada juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempopulerkan batik tulis asal Jetis dengan cara mewajibkan setiap perangkat pemerintahan kelurahan membeli dan menggunakan batik tulis asli asal Jetis Kabupaten Sidoarjo untuk digunakan dihari yang sudah di tentukan sebagai upaya pelestarian.

## 2. Keterlibatan masyarakat

Batik tulis Jetis kabupaten Sidoarjo berkembang ditengah-tengah masyarakat sudah sejak lama dan baru di bentuk sebagai kampoeng batik tulis Jetis pada tahun 2000 an karena alasan yang tertentu, tidak hanya sebagai warisan budaya namun juga sebagai penopang hidup pertumbuhan ekonomi yang mandiri di Kelurahan Jetis.

Sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dengan adanya penguatan kelembagaan seperti paguyuban dan kelompok masyarakat yang banyak sebagai pembatik, maka pemerintahan melakukan upaya penguatan kelembagaan dengan membentuk kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk lebih mengembangkan usahanya kemudian dibina serta difasilitasi seperti pendanaan dan pelatihan. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian serta kepekaan oleh pemerintahan kelurahan terhadap proses pemberdayaan.

## B. Saran

1. Pemerintahan kelurahan harus mengupayakan kegiatan untuk membantu pengelolaan, pemberdayaan UMKM batik di Kelurahan Jetis agar tidak hilang keasliannya, partisipasi dan dukungan pemeritahan kelurahan setiap kegiatan dan

proses pengelolaan UMKM batik kelurahan Jetis Sidoarjo lebih ditekankan dan diadakan kegiatan yang membantu penunjang ekonomi bagi pembatik dan masyarakat sekitar. Membantu pemasaran usaha batik agar meluaskan dan mempermudah penjualan pembatik, membantu agar batik lebih dikenal masyarakat bukan hanya masyarakat Sidoarjo melainkan masyarakat luar.

2. Untuk masyarakat lebih selalu aktif dan mengikuti setiap adanya pelatihan yang diadakan pemerintah desa atau diadakan dari luar. Partisipasi masyarakat juga penting dalam upaya pelestarian usaha batik apalagi pada saat pandemi yang menjadikan proses pemasaran usaha batik menurun. Dengan begitu masyarakat lebih antusias tau dengan perkembangan zaman yang semakin modern, tau tentang cara pemasaran yang baik dan cepat perkembangannya. Keterlibatan masyarakat harus selalu ada dalam kegiatan apapun, karena masyarakat membantu proses setiap kegiatan yang dilakukan, apalagi kegiatan dalam perkembangan perekonomian. Masyarakat juga diharapkan belajar dalam kegiatan-kegiatan yang belum sepenuhnya dikuasai, karena dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat atau yang dipelajari masyarakat membantu dalam berjalannya proses pemberdayaan UMKM batik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi (2006) "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik", Jakarta: Rineka cipta
- Anwar Ramli, Chalid Imran Musa, Muhammad Hasan,( 2019) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Tinjauan Manajemen, Pustaka Taman Ilmu
- Handoyo, Hestu Cipto (2015) "Hukum tata negara" Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Harry Sarundajang, Sinyo (1999) "Arus Balik Kekusaan Pusat ke Daerah", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jamaludin, Adon Nasrullah (2019) "Sosiologi Pedesaan", Surakarta: Pustaka Setia Jurnal Adi
- Soesiantoro, (2020) "Pemberdayaan UMKM Batik di Kampong Batik Jetis oleh Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo" (Universitas 17agustus 1945 Surabaya
- Koho, JosefRiwu, (2007) "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia".
- Meleong Lexxy J, (2014) "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Remaja
- Muhadam Labolo, (2015), "Dialektika ilmu pemerintahan", Sidoarjo: Ghalia Indonesia
- Nasution S (2010), Metodologi Research, (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara,
- Nurcholis Hanif, (2011) "Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Jakarta: Erlangga,
- Pangerang, Moenta (2017) "Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah", Makasar : PT. Raja Grafindo Prasada
- Pramono Hariadi, (2010) salemba empat, Jakarta: pengelolaan keuangan daerah
- Rahayu, Ani Sri (2017)" Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya", Malang: Sinar Grafika

Rukminto, Isbandi (2007) “Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Satori, Djam’an (2011) “Metodoogi Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2017) “Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta

Suharto Didik G. (2016), Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Prespektif UU No.6/2014, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sumaryadi, I Nyoman, (2005) “Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah” Jakarta: Citra Utama

Theresia Aprillia, (2014) “Pembangunan Berbasis Masyarakat”, Bandung: Alfabeta

Rita mrai yana,( 2010) *Pengelolaan lingkungan belajar*, Jakarta: kencana

### **Jurnal**

Yulifar, Lely Jurnal Pemberdayaan Sumber daya manusia Indonesia di tengah krisis global. Vol 9 no 1 2009 di akses pada Jumat 25 Maret 2022 pukul 01:30

### **Skripsi**

Noffi Fitriyani, (2015) “*Peranan Pengrajin Dalam Pelestarian Batik Kudus*” (Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Semarang

Yosi Wulandari (2017): Upaya “Pengembangan Pengrajin Batik Di Desa Wisata Batik Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten” *Kulon Progo I* (fakultas pendidikan universitas negeri Yogyakarta

Wafiq azizah (2022) “Upaya Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sentra Batik Di Kabupaten Muaro Jambi Di Masa Pandemi Corona

Virus Disease-19” Skripsi studi Ilmu Pemerintahan Fakultas syariah Universitas Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi

### **Undang-undang**

Undang-undang dasar, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang kelurahan

### **Sumber Internet**

<https://www.kemenperin.go.id/artikel/22039/Dilanda-Pandemi-Ekspor-Batik-Indonesia-Mampu-Tembus-USD-21,5-juta> di akses tanggal 1 Juni 2022 pukul 01:32

Kewenangan Pemerintahan Darerah dalam pembuatan Peraturan Daerah  
<http://ditjenpp.kemenkuham.go.id/htn-dan-pUndang-Undang/422-harmonisasi-peraturan-daerah-> Di akses pada 24 Maret 2022 Pukul 01:55



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A